

**PERKEMBANGAN KESULTANAN KADRIYAH PADA MASA
SULTAN HAMID II DI PONTIANAK (1945-1978 M)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Humaniora (S.Hum.)**

Oleh

**RESA NURUL ANISA
NIM. 214110503025**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Resa Nurul Anisa
NIM : 214110503025
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Perkembangan Kesultanan Kadriyah Pada Masa Sultan Hamid II Di Pontianak (1945-1978)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti persyaratan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Oktober 2025
Saya yang menyatakan,

Resa Nurul Anisa
NIM. 214110503025

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Perkembangan Kesultanan Kadriyah Pada Masa Sultan Hamid II Di
Pontianak (1945-1978 M)**

Yang disusun oleh Resa Nurul Anisa (NIM 214110503025) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 6 Januari 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora** (S. Hum) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Penguji I


Arif Hidayat, M.Hum
NIP.198801072023211013

Penguji II


Rahman Latif Alfian, M.Ant
NIP. 199109272020122017

Ketua Sidang/Pembimbing


Nurrohm, Lc. M.Hum
NIP.198709022019031011

Purwokerto, 12 Januari 2026


Dekan
Dr. Harun, M.Si.
NIP.197205012005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Oktober 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Resa Nurul Anisa
Lamp. : 5 Ekseplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Resa Nurul Anisa
NIM : 214110503025
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul : Perkembangan Kesultanan Kadriyah pada Masa Sultan Hamid II Di Pontianak (1945-1978)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Humaniora (S.Hum.).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih,
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 16 Oktober 2025


Nurrohmah, L.c., M.Hum
NIP.198709022019031011

PERKEMBANGAN KESULTANAN KADRIYAH PADA MASA SULTAN HAMID II DI PONTIANAK (1945-1978 M).

**Resa Nurul Anisa
NIM.214110503025**

Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126
Email: resanurulanisa22@gmail.com.

ABSTRAK

Kajian ini menelusuri bagaimana Kesultanan Kadriyah beradaptasi terhadap perubahan politik lokal nasional setelah kemerdekaan Indonesia serta bagaimana peran Sultan Hamid II dalam menjaga stabilitas sosial ditengah perubahan struktur negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perkembangan Kesultanan kadriyah masa pemerintahan Sultan Hamid II tahun 1945-1978. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus kepustakaan melalui penelusuran sumber primer dan sekunder. Metode yang digunakan ialah metode sejarah dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan Max Weber, digunakan untuk menganalisis pola otoritas dan strategi kekuasaan Sultan Hamid II dalam mempertahankan kedudukan Kesultanan di tengah perubahan politik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendidikan Sultan Hamid II, baik di lingkungan Kesultanan maupun dalam sistem pendidikan Belanda, membentuk karakter kepemimpinan yang modern dan diplomatis. Pengalaman administratif dan hubungan politiknya dengan Belanda turut mempengaruhi orientasi politiknya pada masa awal kemerdekaan. Sultan Hamid II terlibat dalam dinamika politik nasional melalui keterlibatannya dalam DIKB, BFO, Konferensi Malino, dan berbagai forum perumusan bentuk negara. Seiring konsolidasi kekuasaan pemerintah pusat, Kesultanan Kadriyah bertransformasi dari institusi politik tradisional menjadi simbol sosial dan budaya lokal. Di bidang sosial, Sultan Hamid II berupaya memulihkan hubungan antar-etnis di Pontianak pasca tragedi Mandor serta menjaga kesinambungan tradisi keagamaan dan adat istiadat Kesultanan. Masa pemerintahannya menandai transisi penting antara kekuasaan tradisional dan realitas politik modern di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Perkembangan, Kadriyah, Hamid II, Pontianak.

DEVELOPMENT OF THE SULTANATE KADRIYAH DURING THE PERIODE OF SULTAN HAMID II IN PONTIANAK (1945-1978 AD)

Resa Nurul Anisa
NIM.214110503025

Islamic Civilization History Study Program
Departement of Al-Qur'an and History Studies
Ushuluddin Faculty of Adab and Humanities
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri State Islamic University Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwoerto 53126
Email: resanurulanisa22@gmail.com

ABSTRACT

This study explores how the Kadriyah Sultanate adapted to changes in local and national politics after Indonesian independence and the role of Sultan Hamid II in maintaining social stability amidst changes in state structure. This study aims to analyze and describe the development of the Kadriyah Sultanate during the reign of Sultan Hamid II from 1945 to 1978. This study is a qualitative study with a focus on literature through the search for primary and secondary sources. The method used is the historical method with the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. This study uses Max Weber's Theory of Legitimacy of Power to analyze the authority patterns and power strategies of Sultan Hamid II in maintaining the position of the Sultanate amidst national political changes. The results of the study show that Sultan Hamid II's educational process, both within the Sultanate and in the Dutch educational system, formed a modern and diplomatic leadership character. His administrative experience and political relations with the Netherlands also influenced his political orientation in the early days of independence. Sultan Hamid II was involved in the dynamics of national politics through his involvement in the DIKB, the BFO, Malino Conference, and various forums for formulating the form of the state. As the central government consolidated power, the Kadriyah Sultanate transformed from a traditional political institution into a local cultural and social symbol. In the social sphere, Sultan Hamid II sought to restore inter-ethnic relations in Pontianak after the Mandor tragedy and maintain the continuity of the Sultanate's religious traditions and customs. His reign marked a significant transition between traditional power and modern political realities in West Kalimantan.

Keywords: Development, Kadriyah, Hamid II, Pontianak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	je
ح	Ĥ	h	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	ka danha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es danye
ص	Şad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Đad	d'	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ža'	ž	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em

ن	Nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhirkata Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ininitidak diperlakuakn pada kata-kata arab yang sudah terserapke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الكرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
------------------	---------	---------------------------

- b. Bilata' marbūṭah hidup ataudengan harakat, fathāhataukasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة أظفر	ditulis	<i>Zakātal-fiṭr</i>
-----------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathāh	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	d'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis ditulis	<i>ū</i>
	فروض		<i>furū d'</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------



MOTTO

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

" Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berbantah-bantah yang menyebabkan kalian gentar dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

- Q.S Al-Anfal: 8 -

" Saya berjuang bukan untuk kedudukan melainkan untuk kehormatan bangsa dan daerah: Dari Kadriyah aku belajar tentang kehormatan dari Indonesia aku belajar tentang persatuan"

- Sultan Hamid II -



PERSEMBAHAN

Setelah diselesaikan penelitian pada skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk rasa syukur, penghargaan dan kasih sayang kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam pelajaran akademi dan hidup penulis:

1. Orang tua tercinta Ibu Samrotul Fuadah dan Bapak Redy Bhakti yang menjadi tiang penyangga dalam hidupku. Tanpa doa dan pegorbanan, kasih sayang dan bimbingan dari kalian sejak kecil hingga saat ini. Aku tidak akan mampu menempuh perjalanan panjang hingga menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang selalu menyemangati setiap langkahku.
2. Adiku tersayang Fadli Fadhlul Rohman yang selalu menjadi teman barbagi cerita dan cada tawa kehadiran mu sangat berarti bagiku.
3. Bapak Nurrohm, Lc., M.Hum, selaku dosen pembimbing saya yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saya mengucapkan banyak rasa terimakasih. Semoga bapak selalu diberikan umur panjang, kesehatan dan di mudahkan dalam segala urusannya.
4. Teman-teman SPI A angkatan 2021 dan Almameter tercinta UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan izin- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perkembangan Kesultanan Kadriyah Pada Masa Sultan Hamid II DI Pontianak (1945-1978 M). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa berharap menjadi sumber inspirasi dan teladan yang baik bagi umat manusia. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insyaallah selalu berharap mendapat syafaat beliau di yaumul akhir amin yaa *raball'alamin*.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dan juga hambatan serta rintangan dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentu saja penulis menyadari betul masih terdapat banyak kekurangan dan kendala dalam penulisan skripsi ini, namun skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor 1, Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S. Ag., M.M., selaku Wakil Rektor 2, Prof. Sunhaji selaku Wakil Rektor 3 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hartono, M.Si., selaku Dekan, Prof. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag. M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag, selaku Wakil Dekan II,

Dr. Elya Munfarida, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr.Farah Nuril Izza, MA. Ketua jurusan Studi al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Univeritas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Arif Hidayat, M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah.
6. Nurrohim, Lc., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam serta dosen pembimbing skripsi saya yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberi arahan selama proses penulisan skripsi. Terimakasih atas ilmu dan bimbingannya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan.
7. Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, khususnya dosen-dosen SPI yang telah memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada yang tercinta Bapak Redy Bhakti dan Ibu Samrotul Fuadah perempuan tangguh yang telah menjadi sumber kekuatan, doa dan inspirasi terbesar dalam setiap langkah hidupku. Terimakasih atas doa yang tak pernah surut, dan atas setiap air mata yang kau sembunyikan di balik senyuman ketika melihat anakmu berjuang. Engkaulah alasan terbesar di balik setiap pencapaian yang kualami. Semoga senantiasa Allah melindungi engkau.
9. Adik tersayang Fadli Fadhlu Rohman yang sudah memberi dukungan serta canda tawanya.

10. Kepada yang tersayang Nenekku Ema Muslihah yang doa dan kasih sayangnya tetap hidup dalam detak langkahku Doa dan cintamu adalah cahaya yang menuntunku hingga sampai di titik ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai dirimu.
11. Kepada tante-tanteuku yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan tanpa henti, Terimakasih setiap doa, semangat dan kehadiran yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan ini. Kalian adalah sosok yang selalu menjadi inspirasi di setiap langkahku.
12. Kepada sahabatku Dzihni Kholda Fauziyah, Tania Anggriyani, Fadhila Umi Laila, Umu Umatil Khusna, Marfuah Latifatuz Zahro, Citra Dwi Setiani, Abdul Hakim yang sudah menjadi teman dekat yang selalu ada dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan, semangat yang tak pernah padam. Termakasih telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan ini.
13. Abah Mukti dan Ibu Permata Ulfah beserta keluarga ndalem Pondok Pesantren Al-Quran Al- Amin Pabuaran
14. Abah Anam dan Ibu Rodiyah, Ibu Tsumanah beserta keluarga ndalem Pondok Pesantren At-taujeh Al- Islami 2 Andalusia
15. Teman -Teman Pondok Al- Amin dan Pondok Andalus yang telah mendukung dan menyemangati penulis. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
16. Teman-teman seperjuangan prodi SPI A angkatan 2021 terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita lalui bersama selama menempuh pendidikan ini. Setiap proses, tawa dan perjuangan bersama menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan.

17. Keluarga besar Bani Solihin terimakasih atas kasih sayang, kebersamaan, dukungan dan doanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikut dan membahayakan dan membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya. saya menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan dari orang-orang terkasih. Karya ini tidak akan pernah selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Purwokerto, 22 Oktober 2025



Resa Nurul Anisa
NIM.214110503025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAKv	
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Landasan Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KESULTANAN KADRIYAH DAN LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SULTAN HAMID II.....	22
A. Latar Belakang Kehidupan Sultan Hamid II	22
1. Biografi Sultan Hamid II Kesultanan Kadriyah	22
2. Pendidikan dan pembentukan karakter	24
3. Karir Awal Dan Hubungannya dengan Belanda	26
B. Kesultanan Kadriyah	29
1. Gambaran Umum Kesultanan Kadriyah.....	29
2. Hubungan Politik Kesultana Kadriyah dengan VOC	32

3. Kesultanan Kadriyah Sebelum masa Sultan Hamid	35
BAB III PERKEMBANGAN KESULTANAN KADRIYAH PADA MASA SULTAN HAMID II DI PONTIANAK	42
A. Dinamika Politik Kesultanan Kadriyah pada Masa Sultan Hamid II	42
1. Politik Awal Pasca- Kemerdekaan (1945-1946)	42
2. Keterlibatan dalam Konferensi Politik.....	47
3. Keterlibatannya dalam Politik Nasional dan Lokal	54
4. Masa Pasif Kesultanan Kadriyah (1950-1978).....	69
B. Dinamika Sosial Kesultanan Kadriyah pada Masa Sultan Hamid II	72
1. Kondisi Sosial Masyarakat Pontianak Pasa- Kemerdekaan.	72
2. Transformasi Sosial dan Peran Kesultanan Kadriyah.....	76
3. Pelestarian Identitas Budaya dan Peran Kesultanan Kadriyah sebagai Pusat Nilai Sosial-Religius.....	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Gambar-gambar
Lampiran 2	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 4	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 6	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran 7	Surat Cek Plagiasi
Lampiran 8	Sertifikat BTA/PPI
Lampiran 9	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 10	Sertifikat Pengembang Bahasa Inggris
Lampiran 11	Sertifikat PPL
Lampiran 12	Sertifikat KKN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesultanan Kadriyah merupakan salah satu kesultanan yang memiliki peranan penting dalam sejarah Kalimantan Barat. Sejak abad ke-18, Kesultanan Kadriyah berfungsi sebagai entitas penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di wilayah Borneo. Selain sebagai lembaga kekuasaan politik setempat, Kesultanan Kadriyah juga menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan Barat, dengan Sultan yang berfungsi sebagai sosok sentral dalam masyarakat adat. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Kadriyah mengalami tantangan signifikan dalam mempertahankan keberadaannya di tengah perubahan besar yang berlangsung di tingkat nasional dan lokal. Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Kadriyah menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya. Perubahan sistem pemerintahan nasional membawa pengaruh besar terhadap posisi politik dan sosial Kesultanan ini yang sebelumnya memiliki pengaruh yang kuat ditingkat lokal (Nasrudin, 2019, pp. 56).

Kesultanan Kadriyah didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadrie pada tahun 1771 di Pontianak. Yang merupakan salah satu simbol penting dalam sejarah Islam dan budaya Melayu di Kalimantan Barat, meskipun tidak termasuk kesultanan tertua di Nusantara, keberadaan Kadriyah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan politik, sosial dan keagamaan di wilayah tersebut terutama

dalam membentuk identitas masyarakat Melayu yang bercorak Islam. Eksistensinya tidak hanya memadahi proses Islamisasi di wilayah pesisir Kalimantan, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan lokal yang bertahan di tengah pergolakan kolonialisme dan dinamika politik nasional.

Salah satu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Kadriyah pada masa transisi tersebut adalah Sultan Hamid II, yang memimpin dari tahun 1945 hingga 1978. Ia merupakan sosok yang tidak hanya dikenal dalam lingkup lokal, tetapi juga memiliki peran signifikan di tingkat nasional. Sultan Hamid II dikenal sebagai tokoh yang turut berkontribusi dalam merancang lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Ini menjadi salah satu bukti kontribusi pentingnya dalam membentuk identitas nasional, namun kontribusi ini kerap terpinggirkan akibat kontroversi keterlibatannya dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tahun 1950. Akibatnya Sultan Hamid II, lebih sering dikenang *ambivalen* sebagai perancang lambang negara sekaligus tokoh yang dituduh terlibat dalam gerakan separatis federalis serta terlibat dalam dinamika politik nasional pada masa awal kemerdekaan. Meskipun demikian, posisi Kesultanan Kadriyah mulai mengalami kemunduran seiring dengan penguatan struktur pemerintah pusat di Jakarta. Lambat laun, peran Kesultanan sebagai simbol kekuasaan lokal mulai tergeser oleh sistem pemerintah yang lebih terpusat. Meskipun simbol dan tradisi lokal masih di jaga oleh masyarakat, namun otoritas politik formal Kesultanan melemah, terutama di wilayah Pontianak dan sekitarnya (Iskandar, 2001, pp. 88).

Usai kemerdekaan, Indonesia memasuki era perubahan politik yang sangat aktif. Negara yang baru merdeka tersebut berupaya memperkuat identitas nasional dan membangun struktur pemerintahan yang lebih terpusat, yang mengancam keberadaan kesultanan tradisional. Namun, peran kesultanan sebagai simbol identitas lokal tetap memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat di daerah Pontianak. Seiring dengan penguatan kekuasaan pemerintah pusat di Jakarta, posisi Kesultanan Kadriyah yang sebelumnya berpengaruh besar dalam aspek politik dan sosial mulai meredup (Sulaiman, 2008, pp. 40).

Dalam menghadapi situasi ini, Sultan Hamid II berupaya untuk mengatur dua aspek yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia harus menjaga simbolisme dan otoritas kesultanan yang telah lama ada. Sementara di sisi lain, ia juga perlu beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kontribusi Sultan Hamid II dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Kadriyah sangatlah penting, terutama dalam menghadapi dinamika politik di Indonesia setelah kemerdekaan (Purnomo, 2016, p. 18). Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama, pertama menelusuri latar belakang kehidupan Sultan Hamid II sebagai pemimpin Kesultanan Kadriyah serta posisinya dalam menghadapi tantangan politik dan sosial pasca-kemerdekaan. Kedua, menganalisis perkembangan dan dinamika politik Kesultanan Kadriyah selama masa pemerintahan Sultan Hamid II di Pontianak pada tahun 1945-1978, khususnya dalam merespons tekanan perubahan nasional dan pengaruh kekuasaan pemerintahan pusat. Melalui analisis kedua aspek

ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Sultan Hamid II dalam mempertahankan keberlangsungan Kesultanan Kadriyah sekaligus kontribusinya dalam dinamika politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II sebagai bagian dari dinamika kesultanan-kesultanan di Indonesia pasca-kemerdekaan. Periode 1945-1978 merupakan masa transisi dari sistem pemerintahan tradisional menuju negara nasional, yang menyebabkan sebagian besar kesultanan kehilangan peran politik dan administratifnya. Namun, Kesultanan Kadriyah menunjukkan perkembangan yang relatif berbeda karena masih mampu mempertahankan eksistensinya melalui penyesuaian peran dan fungsi di tengah perubahan politik nasional. Kajian terhadap perkembangan Kesultanan kadriyah menjadi penting karena tidak hanya menggambarkan kemunduran insitusi tradisional, tetapi justru memperlihatkan proses adaptasi dan strategi bertahan yang dilakukan oleh kesultanan dalam struktur negara modern. Dalam hal ini, Sultan Hamid II berperan sebagai aktor utama yang menghubungkan kepentingan kesultanan dengan dinamika politik nasional. Keterlibatannya dalam politik dan pemerintahan nasional dapat dipahami sebagai upaya menjaga legitisasi dan keberlanjutan Kesultanan Kadriyah, bukan semata-mata sebagai ambisi politik pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya fokus analisisnya. Penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek biografis Sultan Hamid II perannya dalam perancang

lambang negara, atau keterlibatannya dalam politik federal. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menepatkan pada Kesultanan Kadriyah sebagai objek kajian utama dengan Sultan Hamid II sebagai aktor penggerak perubahan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian yang masih jarang dibahas, yaitu keterkaitan antara peran politik Sultan Hamid II dan keberlangsungan Kesultanan Kadriyah sebagai institusi tradisional pasca-kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena menawarkan perspektif baru bahwa kesultanan pada masa pasca-kemerdekaan tidak selalu mengalami kemunduran secara pasif, melainkan dapat bertahan melalui strategi adaptasi politik dan perubahan fungsi sesuai dengan dinamika negara nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh Kesultanan Kadriyah pada masa pemerintahan Sultan Hamid II.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berfokus pada perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II di Pontianak (1945-1978 M). Untuk batasan tahun peneliti membatasi mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1978 M, Yang mana pada tahun 1945 Sultan Hamid II dinobatkan sebagai sultan ke-7 juga menjadi masa awal kemerdekaan Indonesia dan keterlibatan dalam politik nasional. Sedangkan pada tahun 1978 sebagai batas akhir dari penelitian yang akan dikaji karena pada tahun inilah wafatnya Sultan Hamid II.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada batasan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Sultan Hamid II Kesultanan Kadriyah?
2. Bagaimana perkembangan dinamika politik dan sosial Kesultanan Kadriyah selama masa pemerintahan Sultan Hamid II di Pontianak tahun 1945-1978?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Perkembangan Kesultanan Kadriyah Pada Masa Sultan Hamid II di Pontianak (1945-1978 M)” adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang kehidupan Sultan Hamid II Kesultanan Kadriyah.
2. Untuk menganalisis dinamika politik dan sosial Kesultanan Kadriyah selama masa pemerintahan Sultan Hamid II di Pontianak tahun 1945-1978. Baik dalam konteks keterlibatannya dipolitik nasional maupun peran simbolik dan sosial setelah tidak lagi aktif secara politik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan yang diperoleh oleh seorang peneliti saat melakukan penelitian yang berhubungan dengan hal ini. Yang mana dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain serta pelengkap referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Sultan Hamid II dan menambah rujukan baru kajian sejarah lokal maupun nasional.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian historiografi Indonesia, khususnya mengenai peran elite politik lokal dalam dinamika pemerintahan pasca-kemerdekaan. Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian politik lokal dan sejarah Kesultanan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumbang tulisan ilmiah, khususnya tentang perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II di Pontianak. Kemudian, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat umum yang tertarik dengan tema perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan apresiasi terhadap peran tokoh lokal dalam sejarah nasional Indonesia.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada mata kuliah sejarah Indonesia modern dan sejarah lokal di perguruan tinggi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam studi ini, sumber yang digunakan mencakup teori-teori yang menjadi dasar penelitian, kemudian kajian pustaka juga dilakukan melalui jurnal, skripsi, atau artikel untuk membedakan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya dan mencegah plagiarisme. Berikut adalah tinjauan dari kajian pustaka dalam penelitian ini:

Pertama, Skripsi berjudul “Sejarah Kesultanan Kadriyah Pontianak 1778–2017” ditulis oleh Sirrullah bin Syaiful Syariansyah, mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan dipublikasikan pada tahun 2019. Penelitian ini membahas profil Kesultanan Kadriyah Pontianak, sejarah berdirinya kerajaan beserta tokoh-tokoh pendirinya sejak tahun 1778 hingga 2017 M, serta memaparkan peninggalan sejarah dan kelestarian budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Kesultanan Kadriyah. Namun, perbedaannya terdapat pada fokus kajian. Penelitian Sirrullah membahas perkembangan Kesultanan Kadriyah secara umum sejak masa Sultan Syarif Abdurrahman hingga sultan terakhir, sedangkan penelitian ini secara khusus menitik beratkan pada perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa pemerintahan Sultan Hamid II.

Kedua, artikel yang berjudul “Sultan Hamid II di Balik Lambang Garuda Tenggelam dalam Sejarah” yang ditulis oleh Samingan dari jurnal sajaratun, pendidikan sejarah Universitas Flores tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Sultan Hamid II yaitu seorang perancang lambang burung garuda pada proklamasi 17 Agustus 1945 yang pada saat itu Indonesia belum memiliki lambang negara. Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas Sultan Hamid II, sedangkan perbedaan penelitian ini tidak membahas tentang Kesultanan Kadriyah di masa Sultan Hamid II Pontianak.

Ketiga, buku yang berjudul “Sejarah Pemerintahan Kesultanan dan Kota Pontianak” ,Dalam buku ini menerangkan pemerintahan kesultanan Pontianak dan kronologi sejarah pemerintahan Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sehingga akan menggali isi buku tersebut sebagai bahan dalam penelitian yaitu perkembangan Kesultanan Kadriyah masa Sultan Hamid II Pontianak tahun 1945-1978. Persamaannya, ialah sama-sama meneliti Kesultanan Kadriyah tetapi perbedaannya yaitu dibuku tersebut tidak memfokuskan pada Kesultanan Kadriyah di masa Sultan Hamid II. Fokusnya hanya pada kronologi sejarah pemerintahan Kesultanan Pontianak dari bermacam-macam keturunan Kesultanan Pontianak.

Keempat, Artikel “Menggali Nilai-Nilai Kepahlawanan Sultan Hamid II di Kancan Lokal dan Nasional” karya Teguh Agustina dan Rina membahas Sultan Hamid II sebagai tokoh yang memiliki nilai kepahlawanan, terutama melalui keterlibatannya dalam perancangan Garuda Pancasila serta kiprahnya dalam diplomasi nasional. Kedua penelitian ini sama-sama menempatkan Sultan Hamid II sebagai figur yang berpengaruh dalam sejarah Pontianak dan Indonesia. Namun, artikel tersebut berfokus pada penggambaran karakter dan kontribusi personal Sultan Hamid II, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada perkembangan Kesultanan Kadriyah sebagai lembaga, khususnya bagaimana struktur dan peran kesultanan bertransformasi selama masa pemerintahannya dari 1945 hingga 1978. Dengan kata lain, penelitian ini melihat Sultan Hamid II dalam konteks kelembagaan, bukan hanya sebagai individu.

Kelima, Buku "Garuda Pancasila: Sejarah Penciptaan Lambang Negara" karya Aries Heru Utomo dkk, membahas proses historis lahirnya lambang negara Indonesia pasca-kemerdekaan. Dalam buku ini, Sultan Hamid II digambarkan sebagai tokoh utama yang merancang konsep awal lambang negara sebelum kemudian mengalami beberapa revisi melalui pembahasan bersama Panitia Lambang Negara dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Persamaan penelitian ini dengan buku tersebut adalah sama-sama mengangkat peran Sultan Hamid II dalam konteks sejarah Indonesia. Namun, perbedaannya, buku Aries Heru Utomo dkk, fokus pada kontribusi Sultan Hamid II dalam pembentukan simbol identitas nasional melalui Garuda Pancasila, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perkembangan Kesultanan Kadriyah selama masa pemerintahannya (1945–1978), khususnya dalam menghadapi perubahan sosial dan politik di tingkat lokal. Jadi, fokus penelitian ini bersifat institusional dan lokal, bukan hanya pada kontribusi nasional Sultan Hamid II.

Berdasarkan lima karya yang telah dikaji, penelitian ini memiliki keunikan karena secara khusus memfokuskan kajian pada perkembangan Kesultanan Kadriyah selama masa pemerintahan Sultan Hamid II (1945–1978). Tidak ada penelitian sebelumnya yang menggabungkan dua aspek ini sekaligus yaitu figur Sultan Hamid II dan perubahan institusional Kesultanan Kadriyah pada eranya. Karya-karya yang ada hanya membahas sejarah kesultanan secara umum, menyoroti Sultan Hamid II dari sisi nasional, atau menggambarkan karakter pribadi beliau. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam

terhadap dinamika kesultanan sebagai lembaga pada masa kepemimpinan Sultan Hamid II, sehingga memberikan sudut pandang yang belum disentuh dalam penelitian terdahulu.

F. Landasan Teori

Dalam studi ini, peneliti mengaplikasikan Teori Legitimasi Kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dapat diterima dan ditaati apabila memiliki dasar legitimasi yang diakui oleh masyarakat. Weber membedakan legitimasi ke dalam tiga bentuk, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, dan legitimasi legal-rasional. Legitimasi tradisional didasarkan pada adat, nilai-nilai, serta sistem pewarisan kekuasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Legitimasi karismatik bersumber dari kualitas pribadi seorang pemimpin yang dianggap memiliki keistimewaan dan mampu menimbulkan kepercayaan serta loyalitas para pengikutnya. Sementara itu, legitimasi legal-rasional berlandaskan pada aturan formal, hukum, serta struktur kelembagaan yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern. Teori Legitimasi Kekuasaan ini bersifat aplikatif karena dapat digunakan untuk memahami dasar penerimaan kekuasaan dalam berbagai konteks sosial, budaya, maupun politik. Melalui teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi sumber keabsahan kekuasaan dalam suatu pemerintahan atau lembaga, apakah berlandaskan tradisi, kharisma pemimpin, atau sistem hukum yang berlaku. Selain itu, teori ini juga memberikan kerangka untuk melihat bagaimana legitimasi dapat mengalami perubahan seiring dinamika politik dan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dengan demikian,

teori legitimasi kekuasaan memberikan landasan konseptual dalam memahami bagaimana kekuasaan terbentuk, dipertahankan, serta dikenali dalam suatu struktur sosial tanpa langsung menilai praktik kekuasaan pada periode tertentu. Teori ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis bentuk legitimasi kekuasaan pada masa yang menjadi fokus penelitian. (Weber, 1978, pp. 97).

Adapun, Penelitian ini menggunakan pendekatan historis sebagai landasan untuk memahami perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II, terutama dalam konteks politik dan pergulatan kekuasaan antara elite tradisional dan pemerintah pusat. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji peristiwa masa lalu secara kronologis, sistematis, dan ilmiah guna memahami dinamika politik yang terjadi pada tahun 1945-1978. Menurut Kuntowijoyo pendekatan historis adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki dan membangun kembali peristiwa masa lalu dengan menerapkan teknik sejarah. Sejarah dipahami tidak hanya sebagai sekumpulan narasi atau dokumentasi masa lalu, melainkan sebagai disiplin ilmu yang dapat menguraikan penyebab dan konsekuensi dari suatu kejadian serta memberikan arti pada realitas sosial (Kuntowijoyo, 2003, pp. 15-18).

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang termasuk dalam kategori kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang sering disebut sebagai *library research*. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Gillbert J. Garraghan, metode sejarah adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang teratur untuk mengumpulkan sumber-

sumber sejarah secara efisien, mengevaluasinya dengan kritis, dan menyusun sintesis dari hasil yang diperoleh dalam bentuk tulisan (Abdurrahman, 2011, pp. 103-105). Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).

1. Pengumpulan Data (Heuristik)

Heuristik merupakan tahapan awal dalam metode sejarah yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelusuri, mengidentifikasi, dan menghimpun sumber-sumber yang berkaitan dengan perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa pemerintahan Sultan Hamid II (1945–1978). Setelah pengumpulan sumber, akan dipetakan ke dalam dua bagian yaitu:

a. Sumber primer

Definisi sumber primer ialah, setiap segala penelitian sejarah yang disampaikan melalui sebuah wawancara, atau bisa juga disampaikan langsung oleh saksi mata yang bersifat sezaman. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Majalah Minggu Pagi berjudul “Sultan Hamid II Djalan Sepur Mati Ia Masuki Sekali Salah Ril” yang merupakan majalah nasional yang terbit pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dalam edisi No.47 tanggal 22 Februari 1953. Yang kedua, rekaman audio wawancara

Sultan Hamid II dengan yayasan idayu tahun 1974, mengenai asal usul perancangan Lambang Negara Garuda Pancasila. Rekaman audio ini berisi penuturan langsung Sultan Hamid II mengenai latar belakang dan proses keterlibatannya dalam perancangan lambang negara Indonesia. Rekaman tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga, foto-foto Sultan Hamid II diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta koleksi digital Leiden University Libraries.

Yang keempat, buku sezaman berjudul “Proses Peristiwa Sultan Hamid II”, yang disusun oleh Jaksa Seluruh Indonesia dan diterbitkan oleh Fasco pada tahun 1955. Yang kelima, Naskah kelahiran Sultan Hamid II, yang tersimpan dalam koleksi arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga digunakan sebagai sumber primer arsip. Selain itu ada dokumen pemerintah No.21 tahun 1950, tentang anggota perancang lambang negara Republik Indonesia Serikat diakses melalui akun resmi JDIH.

b. Sumber Sekunder

Didefinisikan sebagai sumber dalam melengkapi sumber utama sumber sekunder ditemukan dalam bentuk jurnal, buku online, dan beberapa makalah karya ilmiah lainnya. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku “Sejarah Pemerintahan Kesultanan dan Kota Pontianak” karya Safaruddin Usman tahun 2000.

Sumber sekunder lainnya adalah buku “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” karya Herbert Feith tahun 1962 yang diterbitkan oleh Cornell University Press.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Verifikasi merupakan langkah penting dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menilai, menguji, dan menyaring berbagai sumber yang telah diperoleh guna memastikan keasliannya. Proses ini dilakukan untuk menilai tingkat autentitas dan kredibilitas suatu sumber agar penelitian terhindar dari penggunaan data yang tidak valid. Dalam proses ini dikenal dengan dua jenis kritik sumber, yakni kritik eksternal yang berfokus pada keaslian dokumen atau sumber fisik, serta kritik internal yang menelaah isi dan kebenaran informasi dalam dokumen tersebut (Sulasman, 2014, pp. 27).

Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan dianalisis secara internal dan eksternal untuk memastikan keabsahan dan relevansinya yaitu ada:

Majalah Minggu Pagi yang berjudul “ Sultan Hamid II Djalan Sepur Mati Ia Masuki Sekali Salah Ril” Edisi No.47 tahun 1953 digunakan sebagai sumber primer karena memuat pemberitaan dan artikel mengenai Sultan Hamid II, khususnya terkait pandangan politik dan keterlibatannya dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Secara internal, informasi yang disajikan cukup konsisten dengan peristiwa sezaman, namun bersifat selektif karena menekankan isu-isu yang menarik bagi publik. Secara

eksternal, majalah ini diterbitkan oleh media nasional resmi, sehingga sah dan kredibel, meskipun pemberitaan dapat mengandung bias editorial dan tidak selalu menampilkan perspektif Kesultanan Kadriyah secara menyeluruh.

Rekaman audio wawancara Sultan Hamid II dengan yayasan Idayu tahun 1974 juga menjadi sumber primer penting karena memuat kesaksian langsung mengenai proses perancangan Lambang Negara Garuda Pancasila. Dari segi internal, rekaman ini relevan dan mendalam, namun peneliti harus tetap memperhatikan kemungkinan bias subjektif karena narasi bersifat personal. Secara eksternal, arsip rekaman tersimpan di Perpustakaan Nasional dan terdokumentasi di Yayasan Idayu, sehingga keasliannya dapat diverifikasi, meskipun konteks perekaman dapat memengaruhi fokus informasi. Selain itu ada, foto-foto Sultan Hamid II digunakan sebagai sumber primer visual untuk merekonstruksi simbol kekuasaan dan representasi publik Sultan. Internalnya, foto-foto ini menampilkan aktivitas Sultan Hamid II, namun terbatas pada aspek visual dan tidak memberikan informasi naratif. Secara eksternal, foto-foto berasal dari Perpustakaan Nasional dan koleksi digital Leiden University Libraries, sehingga kredibel dan dapat diverifikasi.

Buku “Proses Peristiwa Sultan Hamid II” yang diterbitkan Fasco yang disusun oleh Persadja pada tahun 1955 digunakan untuk memperkuat kronologi peristiwa. Internalnya, buku ini menyajikan uraian rinci mengenai

aktivitas politik Sultan Hamid II dan cukup lengkap, institusional karena disusun oleh instansi resmi. Eksternalnya, buku diterbitkan tidak lama setelah peristiwa terjadi sehingga memiliki nilai historis tinggi dan kredibel.

Naskah kelahiran Sultan Hamid II digunakan untuk memastikan keakuratan data biografis, termasuk identitas, latar belakang keluarga, dan konteks sosial Kesultanan Kadriyah. Secara internal, naskah ini akurat dan faktual, meskipun tidak memberikan konteks politik secara luas. Secara eksternal, arsip tersimpan di Perpustakaan Nasional dan dapat diverifikasi keasliannya, sehingga kredibel sebagai sumber arsip biografis.

Dokumen resmi tahun 1950, tentang anggota perancang Lambang Negara Republik Indonesia diakses melalui JDIH yang mana dokumen ini sesuai dengan arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Indonesia (ANRI), arsip tersebut digunakan juga oleh Heru Utomo dkk tahun 2023, dalam bukunya yang berjudul “Penciptaan Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila”, hal ini memastikan dokumen sah dan dapat dijadikan sumber primer penelitian ini.

Dengan demikian, semua sumber primer yang digunakan telah dianalisis secara internal dan eksternal. Secara internal, sumber-sumber memberikan informasi faktual dan relevan dengan topik penelitian, meskipun sebagian bersifat selektif atau subjektif. Secara eksternal, sumber-sumber dapat diverifikasi keabsahannya dan berasal dari institusi resmi atau publikasi sezaman. Keterbatasan masing-masing sumber dapat diatasi melalui

triangulasi data dengan sumber primer lain maupun sumber sekunder, sehingga penelitian tetap objektif dan akurat.

Selain itu juga sumber sekunder dikritisi untuk memastikan relevansi dan kredibilitas. Peneliti telah melakukan kritik terhadap buku *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* karya Herbert Feith, buku ini merupakan salah satu karya klasik dalam studi politik Indonesia. Yang diterbitkan pertama kali oleh Cornell University Press pada tahun 1962. Dari segi kritik eksternal, sumber ini tergolong otentik karena berasal dari penulis yang memiliki reputasi akademik tinggi dan diterbitkan oleh lembaga ilmiah kredibel. Buku ini mencerminkan kajian ilmiah yang mendalam mengenai sistem politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan terutama periode 1945-1959. Secara kritik internal, buku ini menyajikan analisis yang komprehensif tentang proses transisi dari sistem demokrasi parlementer ke otoritarianisme di Indonesia. Meski tidak secara khusus membahas Kesultanan Kadriyah dan Sultan Hamid II, buku ini memberi pemahaman yang kuat mengenai konteks politik nasional. Oleh karena itu sumber ini sangat relevan untuk melihat dinamika politik yang mempengaruhi posisi kebijakan Sultan Hamid II pada Republik Indonesia Serikat

Selain itu kritik terhadap Buku “Sejarah Pemerintahan Kesultanan dan Kota Pontianak”, karya Syafaruddin Usman, buku ini merupakan karya ilmiah yang mengangkat sejarah lokal Kesultanan Kadriyah dan dinamika pemerintahan di Pontianak. Dari sisi kritik eksternal, buku ini ditulis oleh

peneliti lokal yang memiliki akses langsung terhadap sumber primer, termasuk arsip Kesultanan dan wawancara dengan tokoh masyarakat. Hal ini menjadikan buku tersebut sebagai sumber yang otentik dan sah untuk digunakan dalam penelitian sejarah lokal. Secara kritik internal, buku ini memberikan narasi yang kaya dan mendalam mengenai struktur pemerintahan kesultanan serta perkembangan politik lokal Pontianak, namun fokus penulis ini lebih pada deskripsi historis tanpa banyak analisis kritis terhadap peran Sultan Hamid II dalam politik nasional. Meski demikian buku ini tetap penting sebagai rujukan untuk menggambarkan Kesultanan Kadriyah sebelum masa Sultan Hamid II.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah proses penafsiran fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber sehingga terkumpul bagian-bagian yang menjadi fakta serumpun. Interpretasi seringkali disebut dengan analisis sejarah. Dalam interpretasi tersebut ada 2 cara yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis itu berarti menyatukan. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis sejumlah fakta yang diperoleh sumber-sumber sejarah. Bersama-sama dengan teori disusunlah fakta tersebut kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Dalam langkah ini, setelah peneliti mendapatkan fakta sejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Kadriyah masa Sultan Hamid II Pontianak, kemudian peneliti

melakukan analisis dan sintesis menggunakan teori elit konflik dan legitimasi kekuasaan oleh Max Weber dan Kuntowijoyo pendekatan historis.

4. Historiografi (penulisan sejarah)

Merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah, historiografi yaitu cara penulisan, pemaparan, atau laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulis sejarah dapat diberikan gambaran awal yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal sampai dengan bagian akhir (penarikan kesimpulan). Dalam hal ini, aspek kronologi sangat penting. Peneliti memaparkan hasil penelitian Perkembangan Kesultanan Kadriyah Pada Masa Sultan Hamid II di Pontianak (1945-1978 M) yang disusun secara kronologis berdasarkan sistematika.

H. Sistematika Pembahasan

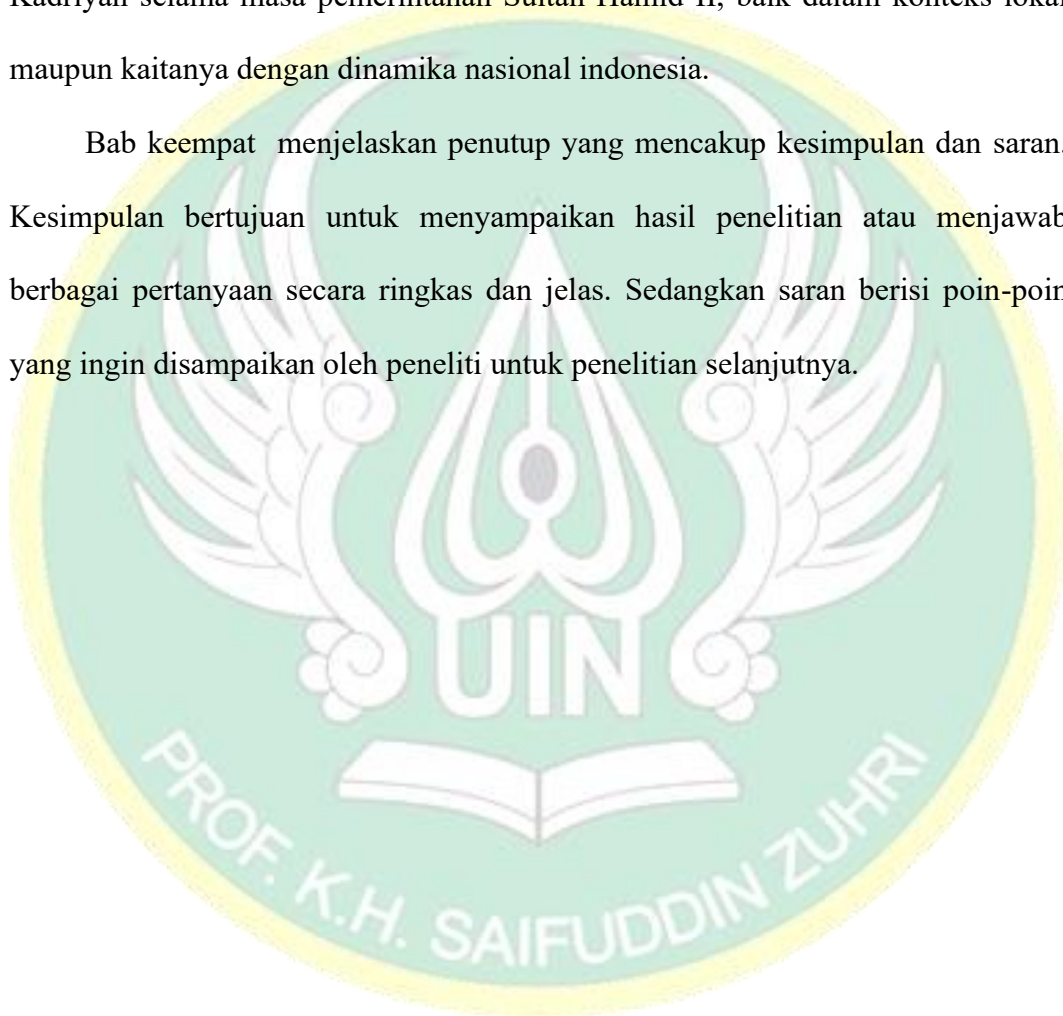
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara runtut dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Pembahasan dibagi ke dalam empat bab utama guna untuk mempermudah penelusuran serta pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi dasar bagi bab-bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai gambaran umum Kesultanan Kadriyah, serta latar belakang kehidupan Sultan Hamid II, yang berisi riwayat hidup Sultan Hamid II mulai dari kelahiran, pendidikan dan pengalaman militer.

Bab ketiga menjelaskan tentang perkembangan politik dan sosial Kesultanan Kadriyah selama masa pemerintahan Sultan Hamid II, baik dalam konteks lokal maupun kaitanya dengan dinamika nasional Indonesia.

Bab keempat menjelaskan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian atau menjawab berbagai pertanyaan secara ringkas dan jelas. Sedangkan saran berisi poin-poin yang ingin disampaikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya.



BAB II
KESULTANAN KADRIYAH DAN LATAR BELAKANG KEHIDUPAN
SULTAN HAMID II

A. Latar Belakang Kehidupan Sultan Hamid II

1. Biografi Sultan Hamid II Kesultanan Kadriyah



Gambar 2.3: Akta kelahiran Sultan Hamid II,1919

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2025)

Berdasarkan dokumen *Verklaring van Ingezetenschap* yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tercatat bahwa Sultan Hamid II lahir di Pontianak pada 12 juli 1913 dengan nama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Qadrie. Ia putra dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie dan Syecha Jamilah Syarwani. Ibunya ialah seorang wanita berkebangsaan Indonesia -

Belanda yang bernama Aldelheid Marie von Conningstein. Sejak kecil Sultan Hamid II, diasuh oleh Miss Fox dan Miss E.M Curties pengasuh-pendidik berkebangsaan Inggris. Latar belakang keluarganya yang Multikultural serta pola pengasuhan ala Barat sangat berpengaruh besar pada perkembangan pola pikir Hamid. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil Hamid telah terbiasa dengan nilai-nilai Eropa. Kondisi tersebut jarang dimiliki oleh Sultan - Sultan Kadriyah Sebelumnya yang umumnya hanya mendapatkan pendidikan lokal berbasis tradisional (Dimiyati, 2013, pp. 4).

Memasuki usia dewasa, pengalaman pendidikan dan pergaulan Hamid di lingkungan kolonial semakin memperkuat orientasi kosmopolitnya. Hal ini tampak ketika 31 Mei 1938 ia melangsungkan pernikahan dengan Marie van Delden, seorang perempuan berkebangsaan Belanda putri dari Kapten van Delden, perwira KNIL. Setelah Hamid dinobatkan sebagai Sultan ke-7 Kesultanan Kadriyah Pontianak. Marie diberi gelar Ratu Mas Mahkota Didie Al-Qadrie. Pemberian gelar tersebut menandakan proses penamaan dan penyesuaian ke dalam tatanan adat Kesultanan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Syarifah Zahra (Edith Denise Corry Al- Qadrie) yang lahir pada 26 Februari 1939, dan Syarif Yusuf (Max Nico Al-Qadrie) yang lahir pada 11 Januari 1942. Keduanya lahir di Malang, kehidupan keluarga Sultan Hamid II kemudian berada pada persilangan antara tradisi Melayu- Islam dan pengaruh budaya Eropa. Anak-anaknya tumbuh dalam suasana keluarga yang mengintegrasikan nilai Kesultanan dengan cara pandang modern (Dimiyati, 2013, pp. 6).

Dengan demikian latar belakang keluarga Sultan Hamid II, termasuk pola pengasuhan dan pernikahannya, memperlihatkan bagaimana unsur lokal dan Barat saling berinteraksi.

2. Pendidikan dan pembentukan karakter

Sultan Hamid II sejak kecil hidup di lingkungan Kesultanan Kadriyah Pontianak yang sarat dengan nilai-nilai Islam dan adat Melayu. Menurut Samingan, pendidikan awalnya di mulai dengan bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) yang berada di Pontianak, Sukabumi dan Yogyakarta. Lalu melanjutkan pendidikannya ke Hogeere Burger School (HBS) yang berada di Malang. HBS ini, Sebuah sekolah menengah kolonial bergengsi yang umumnya di peruntukkan bagi anak- anak Eropa dan kalangan Bangsawan pribumi tertentu. Jadi Pemilihan HBS Malang sebagai tempat pendidikan Sultan Hamid II memiliki implikasi penting dalam pembentukan intelektualitas dan kepribadiannya. HBS (Hoogere Burgerschool) merupakan sekolah menengah kolonial dengan standar tinggi yang pada umumnya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan kalangan elite pribumi tertentu. Dengan masuknya Sultan Hamid II ke HBS Malang, terlihat bahwa ia sudah ditempatkan dalam lingkungan pendidikan yang eksklusif dan sangat Eropa-sentris. Secara kultural, HBS Malang memperkenalkan Sultan Hamid II pada ilmu pengetahuan Barat, pola pikir rasional, dan gaya hidup modern (Samingan, 2020, p. 3). Hal ini berbeda dengan pola pendidikan tradisional Melayu–Islam yang lebih menekankan nilai religius dan adat. Dari sisi psikologis, kondisi tersebut membentuk dualitas identitas dalam diri Hamid II,

di satu sisi ia pewaris Kesultanan Kadriyah yang seras nilai Islam dan tradisi Melayu, tetapi di sisi lain ia ditempa oleh sistem pendidikan kolonial yang mengedepankan modernitas dan rasionalitas.

Menurut Ashari Dimiyati, menyebutkan bahwa selama menempuh pendidikan ELS di Yogyakarta Sultan Hamid II, bertemu dengan calon pangeran Yogyakarta yang mempunyai nama Dorojatun yang dikenal dengan sebutan (Sultan Hamangkubuwono IX). Setelah Sultan Hamid II menyelesaikan pendidikannya ia berpisah dengan Dorojatun dan melanjutkan ke sekolah yang mereka inginkan. Sultan Hamid II, melanjutkan pendidikannya di HBS Malang sedangkan Sultan Hamangkubuwono melanjutkan ke Semarang (Dimiyati, 2013, pp 4-5).

Sultan Hamid II, menempati posisi unik sebagai satu-satunya pemimpin Kesultanan Kadriyah yang memperoleh pendidikan bergaya kolonial dan militer moderen diluar negeri. Ia menempuh pendidikan awalnya di ELS yang ada di Pontianak terus melanjutkan ke ELS sukabumi dan terakhir di ELS Yogyakarta. selama di Yogyakarta Sultan Hamid II, bahkan bersekolah bersama Dorojatun calon Sultan Hamengkubuwono IX, yang menunjukkan adanya relas antar elite pribumi dalam sistem pendidikan kolonial saat itu. Setelah Sultan Hamid II tamat dari HBS Kemudian Sultan Hamid II sempat melanjutkan pendidikannya di THS *Technische Hoongescholl* yang berada di Bandung, yang sekarang di juluki ITB (Insitut Teknologi Bandung). Tetapi saat berada di THS, Sultan Hamid II tidak betah dan memilih untuk keluar lalu

melanjutkan ke sekolah militer yang ada di Berda, Belanda yaitu Koninklijke Militaire Academie (Dimyati, 2013, pp. 5-6).



Gambar 2.4: Sultan Hamid II Pontianak 1946

(Sumber: KITLV A1223, Leiden University Libraries, Public Domain, 2025)

3. Karir Awal Dan Hubungannya dengan Belanda

Sejak muda, Sultan Hamid II memperoleh pendidikan bercorak kolonial yang mempersiapkannya untuk berkarier dalam struktur pemerintahan Hindia-Belanda. Ia menempuh pendidikan militer di Koninklijke Militaire Academie (KMA) Breda, Belanda, sebuah sekolah perwira bergengsi yang menjadi jalur utama bagi calon perwira Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL). Sultan Hamid II termasuk bangsawan Melayu yang berhasil diterima di akademi tersebut dan menyelesaikan pendidikan militernya sebelum kembali ke Hindia-Belanda (Ahdalami, 2017, p. 22–23).

Setelah lulus ia memperoleh pangkat Letnan Dua KNIL pada akhir 1937, yang memberinya reputasi sebagai perwira terlatih Eropa sekaligus memperluas jejaringnya dengan pejabat kolonial (Sirullah, Saminan, 2014, p.

15). Meskipun belum menjabat sebagai Sultan pada masa itu, Sultan Hamid II tumbuh dalam lingkungan elite Kesultanan Kadriyah yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Hindia-Belanda.



Gambar 2. 5: Pendidikan Militer Sultan Hamid II, 1938
(Sumber: KITLV 67378. Digital Collections Laiden University, 2025)

Sebagaimana gambar 2.5 menunjukkan bahwa Sultan Hamid II pernah menempuh pendidikan militer di Belanda. Pada masa tersebut, Hamid mengikuti pelatihan di Koninklijke Militaire Academie (KMA) Berda. Yang merupakan lembaga pendidikan perwira militer bagi Hindia - Belanda. Dokumentasi kegiatan ini tersimpan dalam arsip KITLV Laiden University yang mana menjadi bukti penting mengenai latar belakang pendidikan Hamid. Pengalaman pendidikan di lembaga militer Belanda tidak hanya membekalinya dengan disiplin dan wawasan strategis, tetapi juga memperkuat hubungan personalnya dengan pejabat kolonial. Relasi ini tidak berpengaruh besar terhadap peran politiknya setelah kembali ke tanah air.

Setelah menyelesaikan masa pendidikannya di Eropa dan karirnya di militer Belanda. Hamid kembali ke tanah air dengan membawa pengalaman dan jaringan politik yang luas, kedekatannya dengan Belanda menjadikannya figur penting yang dipandang mampu menjembatani kepentingan kolonial dengan tradisi lokal Kesultanan Kadriyah. Situasi politik di Pontianak semakin berubah ketika ayahnya, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie wafat pada tahun 1944. Kekosongan tahta tersebut akhirnya mengantarkan Hamid untuk dinobatkan sebagai Sultan ke -7 pada 29 Oktober 1945. Proses naik tahta Sultan Hamid II berlangsung dalam suasana yang penuh tantangan sebab momentum itu bertepatan dengan awal masa kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh tarik-menarik kepentingan antara Belanda dan kaum Republik. Dengan posisinya sebagai sultan, Sultan Hamid II tidak lagi berperan sebagai perwira kolonial yang berhubungan erat dengan Belanda, melainkan juga sebagai pemimpin tradisional yang harus menjaga stabilitas politik dan kedudukan Kesultanan Kadriyah di tengah perubahan besar tersebut. Peristiwa penobatannya pada tahun 1945 ini menjadi titik awal kepemimpinan Sultan Hamid II yang kemudian membuka babak baru dalam sejarah Kesultanan Kadriyah (Dimiyati, 2013, pp. 8).

Selanjutnya, setelah berhasil menata kembali Kesultanan Kadriyah pada awal masa pemerintahannya Sultan Hamid II tidak hanya menjabat sebagai Kepala Swapraja Pontianak, tetapi juga memimpin pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Pembentukan DIKB merupakan hasil kesepakatan para raja dan sultan di Kalimantan Barat, yang kemudian

ditetapkan melalui surat keputusan residen Kalimantan Barat tertanggal 10 Mei 1948 Nomer 8.161. Selanjutnya pada 2 Mei 1948, dikeluarkan keputusan oleh Besluit Luitenant Gouverneur Jendral Nomer 8 yang tercatat dalam Lembaran Negara 1948 Nomer 58, yang secara resmi menetapkan Kalimantan Barat sebagai Daerah Istimewa (Agustina & Rina, 2023, p. 15). Dengan demikian perjalanan politik Sultan Hamid II dalam memimpin Kesultanan Kadriyah dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak dapat terlepas dari dinamika nasional yang terjadi pasca- kemerdekaan. Situasi politik yang penuh ketegangan antara pihak Republik dan Belanda turut mempengaruhi arah kebijakan dan posisi Kesultanan Kadriyah dalam percaturan politik Indonesia pada masa.

B. Kesultanan Kadriyah

1. Gambaran Umum Kesultanan Kadriyah



Gambar 1.2: Istana Kesultanan Kadriyah
(Sumber: Dokumentasi milik Annie Nugraha, diakses 2025)

Kesultanan Kadriyah merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Kalimantan Barat pada abad ke-18. Kesultanan ini di dirikan oleh Sultan Abdurrahman Al-Qadrie pada tahun 1771 di Pontianak. Tepatnya di dekat

muara sungai kapuas dan sungai landak, letak yang strategis menjadikan Pontianak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus jalur pelayaran penting di wilayah Nusantara bagian Barat. Pontianak berperan sebagai pintu gerbang wilayah pedalaman Borneo sehingga memperkuat perannya sebagai pusat transit perdagangan. Selain itu posisi Pontianak juga terpengaruh oleh jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Jalur ini menghubungkan Pontianak dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan setelah jatuhnya Kesultanan Malaka. Serta menjadi bagian rute pelayaran antara Tiongkok dan India. Kondisi ini mempermudah transportasi dan menarik berbagai etnis untuk menetap atau berdagang di Pontianak (Hasanuddin & Kristanto, 2001, p. 66).

Dengan demikian, Letak geografis Pontianak yang strategis tidak hanya dipengaruhi oleh sungai besar yang memudahkan akses ke pedalaman, tetapi juga karena posisi kota ini dalam jaringan perdagangan internasional. Sungai Kapuas berfungsi sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan pedalaman dan pesisir. Sementara kedekatannya dengan Selat Malaka membuka peluang bagi interaksi ekonomi lintas negara. Kombinasi faktor ini menjadikan Pontianak sebagai pusat perdagangan yang multietnis yang mana memperkuat dinamika sosial dan ekonomi kota sejak masa pendiriannya.

Dalam perkembangannya Kesultanan Kadriyah (Kesultanan Pontianak) tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat. Sultan berperan ganda

sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus tokoh agama yang di hormati masyarakat Melayu. Selain itu hubungan perdagangan dengan pedangan Arab, Tiongkok, dan Eropa turut memperkuat posisi kadriyah sebagai kerajaan maritim. Akan tetapi sejak abad ke-19 pengaruh kolonial Belanda semakin besar sehingga kewenangan politik kesultanan berangsur-angsur menyempit meski secara kultural tetap diakui oleh masyarakat (Yusriadi, 2006, p. 88).



Gambar 2.2: Masjid Jami Abdurrahman Pontianak
(Sumber: Koleksi Pribadi, Foto oleh Dawilah, 2025)

Sebagaimana yang dijelaskan pada gambar 2.2. Masjid Jami Abdurrahman menjadi salah satu pusat penting dalam perkembangan Kesultanan Kadriyah. Khususnya pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman perkembangan Kesultanan Kadriyah ditandai dengan pembangunan masjid jami sebagai pusat politik dan juga sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah Kalimantan Barat. Syarif Abdurrahman Al-Qadrie mendirikan masjid dan lembaga pendidikan agama sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya.

Menurut Astrini, pendidikan Islam pada masa Sultan Syarif Abdurrahman disampaikan melalui pengajian, halaqoh, dan madrasah, nilai-nilai Islam ditanamkan sebagai kehidupan sosial. Sehingga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial-agama masyarakat Pontianak. Arsitektur masjid ini mencerminkan perpaduan budaya Melayu, Jawa, Timur tengah dan Eropa dengan ciri khas atap bertingkat dan enam tiang utama dari kayu berlian yang kokoh. Masjid ini mampu menampung sekitar 1.500 jamaah dan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Pontianak. Masjid jami Sultan Abdurrahman memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan Barat dan menjadi simbol keberadaan Kesultanan Pontianak yang sah di mata masyarakat dan pemerintahan kolonial Belanda (Astrini, 2023, p. 47).

2. Hubungan Politik Kesultana Kadriyah dengan VOC

Hubungan politik antara Kesultanan Kadriyah Pontianak dengan Belanda di mulai secara resmi pada tahun 1779 melalui sebuah perjanjian kontrak dengan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Perjanjian ini dikenal dengan *Contraden met de Sultan van Pontianak*. Kontrak ini menandai awal keterikatan Pontianak dengan jaringan kolonial Eropa di Kalimantan Barat. Perjanjian tersebut memberi hak kepada VOC atas wilayah yang dikenal dengan “Daerah Seribu” (*Duizend Vierkante Paal*) yaitu lahan yang dijadikan pusat administratif Belanda di Pontianak. Menurut Alqadrie, Kawasan tersebut berkembang menjadi lokasi kedudukan pemerintahan kolonial dengan jabatan *Resident het Hoofd Westerafdeeling van Borneo*. Setelah memperoleh tanah

tersebut VOC tidak semerta-merta membangun, mereka mendirikan sebuah benteng yang diberi nama *Fort Mariannen* yang dikelilingi tembok besar. Sementara di area sekitarnya bermukim pejabat, pegawai, serta pasukan Belanda. Pola pembangunan ini sejalan dengan praktik kolonial Belanda di berbagai daerah yaitu memusatkan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan pada area inti kota. Dengan demikian kawasan "*Duizen Vierkaten Paal*" menjadi pusat kolonial Belanda di Pontianak, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas pemerintahan serta kolonialisasi di Kalimantan Barat (Alqadrie, 1984, pp. 22-24).

Sedangkan menurut Firmansyah, penguasaan "Tanah Seribu" oleh VOC melalui perjanjian dengan Kesultanan Pontianak menunjukkan awal penguasaan kolonial Belanda dalam bentuk kontrol ruang kota. Pada tanggal 5 Juli 1779, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie sepakat memberikan wilayah seluas 1000 x1000 meter di selatan Istana Kadriyah kepada VOC, yang dikenal dengan nama "Tanah Seribu". Wilayah ini kemudian dijadikan pusat administrasi dan kegiatan Belanda, termasuk pembangunan Fort Mariannen sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan (Firmansyah, 2021, p. 112).

Dari sisi politik, pemberian lahan tersebut memperlihatkan adanya kompromi antara otoritas lokal (Kesultanan) dengan kekuatan kolonial (VOC), yang pada akhirnya melemahkan kedaulatan Kesultanan Kadriyah secara ekonomi. Keberadaan pusat administrasi dan benteng di area strategis menjadikan Pontianak sebagai simpul kolonial di Kalimantan Barat. Dari perspektif sosial dan budaya, pembangunan *Fort Mariannen* dan *Duizen*

Vierkanten Paal juga menciptakan segregasi ruang kota area sekitar benteng dihuni oleh pejabat dan tentara Belanda, sedangkan masyarakat lokal di tempatkan di luar zona inti tersebut. Pola ini sejalan dengan praktik kolonial Belanda di berbagai daerah Nusantara, yaitu membangun pusat kekuasaan administratif yang eksklusif dan memisahkan diri dari masyarakat lokal (Andang & Edwin, 2023, p. 836). Dengan demikian, perjanjian "Tanah Seribu" tidak hanya sekadar pengalihan tanah, tetapi menjadi simbol awal kombinasi struktural yang memengaruhi arah perkembangan kota Pontianak. Posisi strategis tanah tersebut di tepi Sungai Kapuas menunjukkan bahwa Belanda memahami pentingnya kontrol atas ruang ekonomi dan transportasi untuk memperkuat dominasi politiknya di Kalimantan Barat.

Sementara itu, menekankan bahwa kontrak antara VOC memberikan keuntungan besar bagi pihak kolonial berupa monopoli perdagangan atas komoditas strategi serta jaminan kebebasan beragama bagi pedagang Belanda. Sejak perjanjian tersebut, Kesultanan Kadriyah semakin bergantung pada dukungan ekonomi dan politik VOC. Sehingga kemandirian politik sultan secara bertahap mengalami pelemahan sejalan dengan hal itu. Ahmadin menjelaskan bahwa kontrak dengan VOC tidak hanya melahirkan ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Tetapi juga turut mengubah orientasi sosial masyarakat Pontianak. Kesultanan dipaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan dagang kolonial, sehingga pola relasi tradisional masyarakat Melayu perlahan terkikis (Ahmadin, 2023, p. 27). Dengan demikian, menunjukkan bahwa kontrak tahun 1779 bukan semata-mata instrumen

kolonial, melainkan juga bentuk kompromi politik. Di satu sisi VOC berhasil menanamkan pengaruhnya, sementara di sisi lain Sultan Syarif Abdurrahman memperoleh legitimasi kekuasaan yang dibutuhkan untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa baru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi kolonial di Kalimantan Barat, sejak awal tidak sepenuhnya bersifat koersif, melainkan dibangun melalui negosiasi dan kompromi yang memberi ruang bagi Kesultanan untuk mempertahankan eksistensi simbolik dan kulturalnya. Namun, kompromi tersebut justru menjadi pintu masuk politik kekuasaan dan ekonomi VOC yang pada gilirannya mengubah arah perkembangan Kesultanan dari entitas yang relatif mandiri menuju struktur kekuasaan yang terikat pada kepentingan kolonial.

3. Kesultanan Kadriyah Sebelum masa Sultan Hamid

Setelah wafatnya Sultan Syarif Abdurrahman pada tahun 1808. Kepemimpinan Kesultanan Kadriyah dilanjutkan oleh putranya yaitu Syarif Kasim Al-qadrie dari tahun (1808-1819). Pada masa pemerintahan Syarif Kasim, Pontianak menghadapi beberapa masalah besar yang cukup sulit diselesaikan. Yaitu adanya masalah bajak laut, pemberontakan di Sambas, serta konflik bersama komunitas Tionghoa. Untuk menanggulangi situasi tersebut, sultan meminta bantuan Inggris pada tahun 1814, yang kemudian mengutus komisaris jenderal untuk mengambil alih sebagian pemerintahan berdasarkan Tarekat London. Seiring berjalannya waktu delegasi Belanda datang ke Pontianak untuk memaksa sultan menandatangani perjanjian yang sangat merugikan Kesultanan Pontianak. Akibat tekanan ini sultan akhirnya terpaksa

menyerahkan wilayah taklukannya yaitu Tayyan dan Matan kepada Belanda (Syafarrudin, 2000, p. 6).

Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Syarif Osman Al-qadrie (1819- 1855) pada saat itu, Belanda kembali menawarkan perjanjian baru untuk memperkuat kekuasaannya. Belanda mulai mengkonsolidasikan kembali kekuasaannya di Hindia- Belanda setelah bubarnya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pada tahun 1799. Sehingga jalur perdagangan di Kalimantan Barat kembali diawasi dengan lebih ketat, situasi tersebut membawa dampak langsung terhadap Pontianak yang sejak awal berdirinya sudah memiliki posisi strategis karena letaknya di muara sungai Kapuas dan menjadi jalur distribusi utama ke pedalaman Kalimantan. Menurut Syafarudin Usman pemerintahan Syarif Osman adalah masa dimana Belanda mulai melakukan pendekatan politik terhadap kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak dengan tujuan mengamankan jalur perdagangan dan memperluas pengaruh politiknya (Safarrudin, 2000, p. 7). bahwa sejak awal abad ke-19, Kesultanan Pontianak sudah berada dalam posisi diplomatik yang harus menyesuaikan diri dengan pengaruh politik Belanda di Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa masa Syarif Osman bukan hanya kelanjutan dari pemerintahan ayahandanya tetapi juga awal dari fase baru dimana Kesultanan harus menyeimbangkan kepentingan internal dan tekanan eksternal.

Setelah wafatnya Syarif Osman pemerintahan Kesultanan Kadriyah diambil alih oleh Sultan Syarif Kasim Al-Qadrie. Pada periode ini hubungan perdagangan dengan Belanda mulai meningkat walaupun masih bersifat

diplomatis secara perlahan pengaruh kolonial mulai menembus sistem pemerintahan lokal. Setelah Belanda menancapkan pengaruhnya di Kesultanan Pontianak (Kesultanan Kadriyah) mereka berulang kali memaksa para sultan untuk menandatangani perjanjian politik yang sangat merugikan. Perjanjian tersebut membuat sultan tidak lagi berkuasa penuh. Sebab pemerintahan Belanda ikut mengatur jalannya pemerintahan Kesultanan. Bahkan pada masa Syarif Osman, sultan hanya berperan sebagai penguasa simbolik, sementara urusan administrasi dan keuangan dikuasai oleh Belanda. Menurut Syafaruddin, Belanda memaksa Kesultanan Pontianak untuk memenuhi perjanjian yang isinya berupa pemerintahan Belanda bersama-sama sultan memerintah Kesultanan Pontianak dan penghasilan kesultanan dibagi menjadi dua dengan memperoleh gaji dari pemerintahan Belanda. Keadaan demikian berjalan terus menerus selama masa pemerintahan Syarif Osman (Syafaruddin, 2000, p. 8).

Pada masa itu, strategi politik Belanda menggunakan politik kontrak dan sistem perjanjian dengan sultan untuk mengendalikan kedaulatan politik lokal. Sultan yang seharusnya memiliki kekuasaan penuh perlahan menjadi bagian dari birokrasi kolonial. Dampak politiknya membuat sultan kehilangan otonomi dalam mengambil keputusan, meskipun masih diakui sebagai penguasa adat serta kekuasaan politiknya terbatas secara signifikan. Menurut Djamhari, Belanda memasukkan pengaruhnya ke dalam kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat dengan memaksa perjanjian politik dan menjadikan sultan sebagai bagian dari administrasi kolonial (Djamhari, 2010, pp.120).

Selanjutnya setelah Syarif Kasim wafat pemerintahan Kesultanan Kadriyah di lanjutkan oleh Syarif Hamid 1 yang memerintah pada tahun (1855-1872), priode inilah Kesultanan Kadriyah menghadapi kondisi politik yang cukup kompleks karena semakin kuatnya pengaruh kolonial Belanda di Kalimantan Barat. Yang melalui kontrak politik dan perjanjian Belanda yang mulai mengatur jalannya pemerintahan di Pontianak. Walaupun begitu Sultan Hamid 1 tetap mempertahankan peran kesultanan sebagai pusat legistasi adat, budaya dan agama masyarakat setempat.

Setelah pemerintahan Sultan Hamid I berakhir kepemimpinannya di ambil alih oleh Syarif Muhammad Al-Qadrie, Pemerintahan pada masa itu berlangsung dalam dua periode penting, yaitu masa akhir kekuasaan Hindia-Belanda dan awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Belanda menerapkan politik etnis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Pontianak. Pembangunan infrastruktur dan Pendidikan, memang memberi kesempatan bagi pribumi untuk mengenal modernisasi, tetapi tujuan utamanya adalah memperkuat kontrol administrasi kolonial. Akibatnya, Kesultanan Kadriyah tidak lagi memiliki kendali penuh atas kebijakan politik dan ekonomi daerahnya. Sektor keuangan dan hukum dikuasai Belanda, sedangkan sultan hanya di jadikan simbol tradisional untuk menjaga ketertiban sosial. Akhirnya masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad ditandai dengan runtunya kekuasaan Belanda pada maret 1942, akibat invasi Jepang, pendudukan Jepang membawa perubahan drastis, termasuk pengetatan kontrol politik dan penangkapan sejumlah elit lokal. Dalam hal ini Sultan Syarif

Muhammad berada pada posisi yang sulit karena kewenangan kesultanan semakin dipangkas Kedudukan Kesultanan Kadriyah Menjelang masa Sultan Hamid II (Hasanudin, 2016, p. 205).

Menurut Prabowo, Pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, tepatnya pada 2 Februari 1942, Pontianak jatuh ke tangan pasukan Kekaisaran Jepang. Kedatangan Jepang disambut oleh sebagian masyarakat yang berharap dapat mengakhiri penjajahan Belanda. Namun, harapan tersebut segera sirna ketika Jepang mulai menerapkan kebijakan represif. Pada 24 Januari 1944, Jepang menuduh Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie bersekutu dengan Belanda dan memberontak terhadap kekuasaan Jepang. Akibatnya, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie dieksekusi bersama anggota keluarga dan bangsawan Melayu lainnya. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Mandor, yang menewaskan lebih dari 21.000 orang, termasuk para sultan dan tokoh masyarakat Melayu di Kalimantan Barat (Prabowo, 2019, P. 33). Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie memiliki seorang putra yaitu Syarif Abdul Hamid Al-Qadrie, yang saat itu berada di Batavia (sekarang Jakarta) sebagai tawanan perang Jepang. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Syarif Abdul Hamid Al-Qadrie dibebaskan dan kembali ke Pontianak. Ia kemudian diangkat sebagai Sultan ke -7 Kesultanan Kadriyah, menggantikan ayahnya yang gugur. Sultan Hamid II

berperan sebagai simbol identitas dan pemersatu masyarakat Melayu Pontianak, meskipun kekuasaannya terbatas oleh struktur pemerintahan kolonial dan kemudian pasca-kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, menjelang masa pemerintahan Sultan Hamid II, kedudukan Kesultanan Kadriyah lebih bersifat simbolik dari pada praktis. Kesultanan menjadi lambang identitas Melayu–Islam, tetapi kehilangan hampir seluruh wewenang pemerintahan. Trauma akibat Peristiwa Mandor, keruntuhan ekonomi masa perang, serta kembalinya kekuatan kolonial menjadikan Sultan Hamid II lebih berperan sebagai diplomat dan aktor politik federal ketimbang raja berdaulat. Kondisi ini menunjukkan transformasi penting, dari kerajaan berkuasa di abad ke-18 dan ke-19, Kesultanan Kadriyah memasuki era baru sebagai penopang identitas lokal dalam negara Indonesia yang sedang dibangun.

Sultan Hamid II sendiri tampil sebagai sosok yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas. Menurut Agustina, ia terlibat aktif dalam dinamika politik nasional, meskipun langkah-langkah politiknya menimbulkan perdebatan. Peran besarnya yang paling dikenal adalah sebagai perancang Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Dengan demikian, meskipun Kesultanan tidak lagi memegang kekuasaan politik yang besar, Sultan Hamid II berhasil memberikan kontribusi yang penting bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan (Agustina, 2010, p. 12).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh SIRRULLAH, yang menyatakan bahwa masyarakat Pontianak masih menempatkan Sultan dan istana sebagai pusat tradisi. Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi kesultanan tidak hanya bersumber dari kekuasaan politik, tetapi juga dari pengakuan sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, menjelang masa Sultan Hamid II, kedudukan

Kesultanan Kadriyah mengalami pergeseran dari pusat kekuasaan politik menuju simbol identitas budaya, sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan identitas nasional Indonesia (Ahdalami, SIRRULLAH, 2019, p. 22).



BAB III

PERKEMBANGAN KESULTANAN KADRIYAH PADA MASA SULTAN

HAMID II DI PONTIANAK

A. Dinamika Politik Kesultanan Kadriyah pada Masa Sultan Hamid II

1. Politik Awal Pasca- Kemerdekaan (1945-1946)

Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membawa dampak besar bagi Kalimantan Barat termasuk Kesultanan Kadriyah di Pontianak. Pada masa pendudukan Jepang, otoritas politik Kesultanan mengalami kemunduran drastis bahkan sebagian besar bangsawan dan elit Melayu Pontianak menjadi korban eksekusi masal oleh tentara Jepang dalam peristiwa Mandor. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam dan menyebabkan struktur politik tradisional Kesultanan Kadriyah berada dalam kondisi lemah. (Prabowo, 2019, p. 5).

Namun demikian, Sultan Hamid II yang sebelumnya menempuh pendidikan militer di Belanda, muncul sebagai figur utama dalam upaya menghidupkan kembali posisi Kesultanan pasca-1945. Kekosongan kepemimpinan lokal di Kalimantan Barat setelah Jepang mundur membuka ruang bagi bangsawan Melayu, khususnya Sultan Hamid II untuk tampil kembali sebagai representasi politik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Vickers yang menekankan bahwa masa transisi 1945 merupakan momen paling penting bagi elite tradisional di Indonesia. Dimana mereka harus memilih apakah akan berinteraksi dengan Republik atau mencari jalur lain melalui federalisme (Vickers, 2005, p. 56).

Disatu sisi, pemerintahan Indonesia yang baru berdiri berupaya menjalain komunikasi dengan berbagai kerajaan dan Kesultanan di luar Jawa termasuk Kadriyah, untuk memperluas legitimasi nasional. Namun di sisi lain Belanda memulai NICA (Netherlands Indies Civil Administration) juga berusaha menarik dukungan Sultan Hamid II untuk mendukung konsep negara federal sebagai strategi melemahkan Republik. Dalam konteks pasca-penyerangan Jepang, posisi Kesultanan Kadriyah Pontianak berada dalam situasi yang ambigu. Secara kultural, Kesultanan tetap menjadi simbol identitas masyarakat Melayu Pontianak, tetapi secara politik terjepit antara tawaran integrasi ke Republik Indonesia dan bujukan Belanda melalui pembentukan negara-negara federal (Ricklefs, 2001, p. 102).

Menurut Kahin, upaya Belanda membentuk sistem federal pasca-1945 merupakan strategi untuk mempertahankan pengaruh kolonial melalui dukungan elite-elite lokal yang masih memiliki kekuasaan tradisional (Khain, 1952, p. 138). Dalam konteks tersebut, langkah Sultan Hamid II yang menerima posisi sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan aktif dalam Bijeekomst voor Federaal Overleg (BFO) dapat dipahami sebagai strategi politik untuk menjaga eksistensi Kesultanan Kadriyah di tengah arus besar nasionalisme Indonesia. Dengan demikian, posisi Kesultanan Kadriyah setelah Jepang menyerah tidak sepenuhnya lemah tetapi sebaliknya, ia menempati ruang negosiasi baru antara kekuatan Republik dan Belanda, menunjukkan kemampuan adaptasi elite lokal dalam menghadapi perubahan

politik nasional (Agustian, 2010, pp. 47-50).

Kondisi politik di Kalimantan Barat setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, mengalami kekacauan dan ketidakpastian kekosongan administratif akibat runtuhnya pemerintahan militer Jepang menciptakan ruang perebutan kekuasaan antara berbagai kekuatan politik. Berdasarkan catatan dalam sejarah revolusi kemerdekaan daerah Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Kanwil Depdikbud, masa transisi tersebut ditandai bangkitnya gerakan pemuda dan organisasi lokal yang mencoba mengambil alih peran politik di tengah kevakuman pemerintahan kolonial (Kanwil Depdikbud, 1992, p.14).

Di sisi lain Belanda melalui Netherland Indies Civil Administration (NICA) segera kembali ke Kalimantan Barat dan berusaha menarik dukungan elite lokal, termasuk Sultan Hamid II untuk mendukung konsep negara federal. Situasi ini semakin kompleks dengan munculnya Revolusi Oktober 1946 di Pontianak. Yaitu gerakan rakyat menentang upaya Belanda menguasai Kalimantan Barat. Menurut Prabowo perlawanan ini tidak hanya mencerminkan semangat nasionalisme, tetapi juga memperlihatkan ketegangan antara golongan Republik dengan sebagian elite tradisional yang memilih bekerja sama dengan Belanda demi menjaga posisi politiknya. Dalam konteks ini Kesultanan Kadriyah menghadapi dilema. Apakah harus mengintegrasikan diri dengan Republik atau mempertahankan otonomi melalui federalisme yang ditawarkan Belanda (Prabowo, 2019, p. 40). Dengan demikian jika dilihat dari dinamika 1945-1946 di Kalimantan Barat, situasi

politiknya tidak bisa dipahami hanya sebagai pro- Belanda atau Pro- Republik semata-mata ada tiga lapisan kekuatan yang saling tarik-menarik. Pertama, kelompok pemuda dan rakyat biasa yang cenderung pro-Republik, terbukti dengan Revolusi Oktober 1946 yang menolak kehadiran kembali Belanda. Kedua, Belanda melalui NICA yang berusaha menghidupkan kembali struktur federal sebagai cara melemahkan Republik. Ketiga, elite tradisional termasuk Kesultanan Kadriyah, yang berada di posisi serba sulit di satu sisi menjadi simbol kultural Melayu, tapi di sisi lain juga harus menjaga agar kekuasaan politik mereka tidak hilang sama sekali.

Dalam konteks ini, pilihan Sultan Hamid II mendekat ke federalisme sebenarnya bisa dibaca sebagai strategi survival politik. Ia sadar bahwa tanpa perlindungan struktur politik baru, Kesultanan Kadriyah yang sudah lemah pasca eksekusi bangsawan di masa Jepang akan tenggelam dalam arus nasionalisme. Jadi, langkahnya lebih tepat dilihat sebagai upaya mempertahankan ruang negosiasi dan legitimasi kesultanan, bukan semata-mata berpihak ke Belanda.

Selain itu, dinamika ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki karakter revolusi yang berbeda dengan Jawa. Di Jawa, benturan jelas antara Republik dan Belanda, sementara di Kalimantan Barat ada lapisan tambahan berupa peran kuat elite tradisional Melayu. Analisis ini sejalan dengan pandangan Heather Sutherland tentang bagaimana elite lokal di masa transisi sering memanfaatkan kekacauan politik untuk menjaga otonomi

mereka. Artinya, Sultan Hamid II bukan sekadar aktor pasif yang dimanfaatkan Belanda, melainkan juga aktor aktif yang mencoba memainkan politik identitas Melayu untuk mengamankan posisi Kadriyah di panggung nasional.

Setelah kekosongan kekuasaan pasca penduduk Jepang, Sultan Hamid II, tampil dalam kaca diplomasi nasional, khususnya melalui perannya sebagai ketua *Bijeenkomst Voor Federale Overleg* (BFO) dalam proses pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam kapasitas tersebut, Sultan Hamid II awalnya dipercayakan oleh Belanda untuk mewujudkan pemerintahan federal sementara, sesuai dengan perjanjian Linggajati, dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa keterlibatan Republik sepenuhnya. Sementara itu, Teguh menyebutkan bahwa keterlibatan diplomatik ini bukan hanya sebagai representasi elite tradisional, tetapi juga sebagai bentuk upaya keras dari Sultan Hamid untuk mempertahankan legitimasi politik dan sosial Kesultanan Kadriyah di mata rakyatnya Pontianak (Teguh, 2023, p.17).

Sultan Hamid, setelah resmi menjadi Sultan pada 29 Oktober 1945, latar belakang pendidikan Belandanya sebagai modal diplomasi untuk bernegosiasi baik dengan Republik maupun Belanda dalam forum federalisme. Keterlibatan Sultan Hamid II dalam diplomasi melalui BFO menunjukkan bahwa dia tidak pasif dalam menghadapi tekanan politik. Langkahnya menduduki jabatan penting dalam organisasi federal menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa kekuatan militer atau dominasi Republik saja belum tentu

menjamin posisi Kesultanan tetap dihormati. Strateginya tampak sebagai upaya menyeimbangkan antara tuntutan nasionalisme dan kebutuhan lokal, antara menjaga hubungan dengan Belanda yang masih mempunyai pengaruh, sekaligus menjaga basis sosial di Kalimantan Barat yang mengharapkan agar identitas Melayu Kadriyah tetap terlindungi (Suryadinata, 2010, p .210). Namun demikian, pilihan ini juga membawa risiko politik publik melihatnya sebagai terlalu dekat dengan Belanda, atau condong ke federalisme yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai cara Belanda untuk mengendalikan Indonesia. Dalam konteks ini, Sultan Hamid II bisa dipahami menggunakan diplomasi sebagai alat legitimasi dan survival (bertahan hidup), bukan sebagai loyalis Belanda sepenuhnya. Strategi ini mencerminkan dilema elite tradisional di banyak daerah apakah menerima federasi agar bisa mempertahankan pengaruh lokal, atau ikut Republik sepenuhnya tapi mungkin kehilangan otoritas tradisional.

2. Keterlibatan dalam Konferensi Politik

Konferensi Malino diadakan untuk membahas gagasan Politik Federal antara Belanda dan tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung pembentukan negara berbentuk federal sebagaimana diusulkan Belanda. Langkah ini sesungguhnya merupakan strategi Belanda untuk memecah belah persatuan Indonesia dengan menciptakan negara-negara bagian yang tetap berada di bawah kekuasaan Kolonial Belanda, sementara Republik Indonesia hanya diposisikan sebagai salah satu bagian dari federasi tersebut. Sejak April 1944,

Belanda telah merencanakan upaya pendudukan kembali Indonesia. Dalam rangka itu, Belanda dan Inggris mengadakan perundingan di London dan Kandy yang melahirkan *Civil Affairs Agreement*. Kesepakatan ini mengatur penyerahan kembali wilayah Indonesia dari Inggris kepada Belanda, khususnya di Sumatra yang berada di bawah pengawasan *South East Asia Command* (SEAC) (Rijal, 2018, pp. 7-8).

Pada 15 Juli 1946, sehari sebelum Konferensi Malino dimulai, seluruh peserta telah tiba dan ditempatkan di sejumlah penginapan di sekitar Malino. Ruang sidang konferensi sendiri dipersiapkan di sebuah Gereja Katolik milik Misa. Van Mook hadir ketika konferensi resmi berlangsung. Peserta yang hadir terdiri atas wakil Belanda dan Indonesia, termasuk tokoh masyarakat, pemimpin kelompok sosial, kepala swapraja, perwakilan adat, serta wartawan dari dalam maupun luar negeri. Setelah semua peserta berkumpul, konferensi dibuka oleh Van Mook dan di jadwalkan berlangsung selama sepuluh hari, yakni 16–25 Juli 1946. Pembahasan utama difokuskan pada rencana pembentukan negara-negara bagian dalam kerangka federal serta sistem ketatanegaraannya. Selama jalannya konferensi muncul sejumlah resolusi, mosi, dan pertanyaan dari peserta, namun perdebatan terpenting berkisar pada penentuan bentuk negara (Rijal, 2018, p. 8).



Gambar 3:6:Konferensi Malino juli 1946

(Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde, KITLV, 2025)

Sebagaimana terlihat pada gambar 3.6. suasana rapat pleno Konferensi Malino pada Juli 1946 memperlihatkan keterlibatan aktif para perwakilan daerah dalam membahas bentuk pemerintahan di Indonesia pasca- kemerdekaan. Dalam forum tersebut, Sultan Hamid II hadir sebagai perwakilan Kalimantan Barat dan berperan penting dalam menyampaikan pandangan mengenai perlunya otonomi yang luas bagi daerah, sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi politik Kesultanan Kadriyah di tengah perubahan struktur pemerintahan yang sedang berlangsung (Prabowo, 2019, p. 35).

Konferensi Malino merupakan forum penting yang di gagas oleh pemerintah Hindia- Belanda untuk membahas pembentukan negara federal di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Sultan Hamid II hadir sebagai perwakilan Kalimantan Barat bukan sekedar simbol tetapi juga berperan aktif memberi masukan mengenai bentuk pemerintahan. Sultan Hamid II menyampaikan pandangan agar Kalimantan diberikan otonomi yang luas, bukan hanya

dijadikan daerah administratif Belanda. Ia mengusulkan agar pembenukan negara federal tidak hanya alat Belanda, tetapi benar-benar menghormati kedaulatan dan keistimewaan daerah (Magenda, 1991, pp. 52-57). Dengan demikian kehadiran elite lokal seperti Sultan Hamid II dimaksudkan untuk menjaga pengaruh wilayah sekaligus menjadi jembatan negosiasi dengan Belanda Sultan Hamid II menekankan perlunya untuk mempertahankan otonomi Kesultanan di bawah struktur federal. Yang menunjukkan adaptasi politik elite tradisional terhadap tekanan kolonial.

Setelah Konferensi Malino, langkah Belanda berlanjut dengan menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada 7–24 Desember 1946. Di Bali Hotel Denpasar, yang merupakan keberlanjutan dari Konferensi Malino yang diselenggarakan Belanda pada Juli 1946. Pertemuan ini mempertemukan sekitar tujuh puluh tokoh politik dan pemimpin daerah dari kawasan timur Indonesia, dengan agenda utama membentuk negara Indonesia Timur (NIT) sebagai salah satu komponen negara federal yang direncanakan Belanda melalui Republik Indonesia Serikat (RIS) M.C Turnan menegaskan bahwa konferensi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menata struktur politik dikawasan Timur, melainkan juga sebagai strategi Belanda untuk melemahkan kedudukan Republik Indonesia. Dengan menghadirkan elit-elit lokal, Belanda berupaya menciptakan legitimasi politik federalisme agar tampak mendapat dukungan luas (Turnan, 1952, p. 153).

Menurut Ricklefs, konferensi Denpasar menjadi titik penting karena menghasilkan bentuk negara bagian yang dapat dikendalikan Belanda. Khususnya melalui dukungan biokrasi dan tokoh pro- Belanda. Meskipun demikian keberhasilan membentuk NIT justru memperuncing perdebatan mengenai federalisme kaum Republik menilai langkah ini sebagai upaya pecah belah yang mengancam cita-cita negara kesatuan. Bahkan dari dalam konferensi sendiri muncul kritik terutama terkait Papua Barat yang mana oleh Belanda dikecualikan dari NIT. Hal ini menimbulkan penolakan dari sebagian tokoh Papua, yang mana menunjukkan bahwa legitimasi keputusan Denpasar masih lemah (Ricklefs, 2001, p. 108)

Pembentukan NIT melalui Konferensi Denpasar tidak bisa dilepaskan dari strategi politik elite lokal, termasuk sultan dan bangsawan yang melihat federalisme sebagai ruang kompromi dengan Belanda untuk mempertahankan otoritas tradisional mereka. Pola ini juga terlihat dalam sikap Sultan Hamid II di Kalimantan Barat yang cenderung mendukung gagasan federalisme. Bagi Sultan Hamid II, keterlibatan dalam proyek federal memungkinkan Kesultanan Kadriyah tetap eksis secara politik, meskipun harus bernegosiasi dengan kekuatan kolonial (Pramita, Djabier, 2010, pp. 30-50).

Dokumen diplomatik Amerika Serikat dalam Foreign Relations of the United States (FRUS, 1946) juga mencatat bahwa Belanda menggunakan Konferensi Denpasar untuk memperkuat posisi politiknya di mata dunia internasional. Dalam laporan tersebut disebutkan:

“Belanda memandang Konferensi Denpasar sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia lebih dari sekadar Republik yang diproklamirkan oleh Sukarno Hatta" (Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, 1946).

"The Dutch viewed the Denpasar Conference as an opportunity to demonstrate that Indonesia was more than the Republik proclaimed by Sukarno Hatta."(Foreign Relation of the United States, 1946).

Konferensi Denpasar dipandang penting oleh Belanda untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa “Indonesia” tidak hanya berarti Republik yang diproklamasikan Sukarno-Hatta, tetapi juga federasi berisi negara-negara bagian. Hal ini menjadi bagian dari strategi diplomatik Belanda di arena internasional, terutama menjelang perundingan dengan Republik (FRUS, 1946).

Dalam salah satu laporannya disebutkan bahwa:

“Kesepakatan untuk bekerja sama dalam pembentukan (sebelum Januari 1949) negara demokrasi berdaulat atas dasar federal, Negara Bersatu Indonesia, yang meliputi wilayah Republik, Kalimantan, dan Timur Raya. (Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, 1946, dokumen 644)."

"Agreement to cooperate in the formation (before Januari, 1949) of a sovereign democratic state on a federal basis, the United State of Indonesia, comprising the territory of the Republik, Borneo, and the Great East. "(Foreign Relation of the United States, 1946, doc. 644)."

Kutipan ini menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan untuk membentuk negara demokratis berdaulat dengan sistem federal bernama "United States of Indonesia" yang terdiri dari wilayah republik Indonesia yang terdiri dari wilayah Republik, Kalimantan dan Indonesia. Belanda berupaya menampilkan

proses federalisasi sebagai bentuk kemajuan politik menuju pemerintahan sendiri (*self-government*). Namun secara substantif langkah ini merupakan strategi dipolitik untuk melemahkan posisi Republik Indonesia menjelang perundingan politik berikutnya (FRUS, 1946).

Dengan demikian, Konferensi Denpasar dapat dilihat bukan sekadar forum pertemuan, tetapi juga sebagai instrumen politik kolonial yang berimplikasi besar terhadap arah politik Indonesia. Dari sisi Belanda, konferensi ini memperkuat proyek federalisme dari sisi Republik, hasil Denpasar menjadi ancaman terhadap integrasi nasional sementara bagi elite lokal seperti Sultan Hamid II, federalisme memberi peluang untuk menjaga posisi dan kekuasaan di tengah perubahan politik yang cepat. Hal ini memperlihatkan bahwa Denpasar tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul penting dalam dinamika politik nasional dan lokal pasca-kemerdekaan (Prabowo, 2019, pp. 69-71). Meskipun Konferensi Denpasar terutama mengumpulkan wakil-wakil dari wilayah timur nusantara untuk membahas pembentukan Negara Indonesia Timur, catatan sejarah menunjukkan bahwa elite-elite dari daerah lain yang pro-federalisme termasuk tokoh-tokoh Melayu di Kalimantan seperti Sultan Hamid II aktif memanfaatkan momentum politik yang diciptakan rangkaian pertemuan Malino dan Denpasar. Sultan Hamid II tercatat sebagai salah satu figur yang terlibat di arena negosiasi federalisme, ia berperan dalam forum-forum federal (seperti BFO) dan mengikuti perundingan-perundingan yang linier dengan upaya Belanda membentuk

negara-negara bagian. Dalam praktiknya, keterlibatan Sultan Hamid II lebih bersifat partisipasi dalam jaringan politik federal (BFO) dan pertemuan terkait dibandingkan sebagai delegasi utama yang mengatur agenda Denpasar sendiri. Hal ini diperkuat oleh laporan Konsul Jendral Amerika Serikat di Batavia kepada Menteri Luar Negeri pada 19 Desember 1946 yang menyebutkan bahwa:

“Menurut laporan Konsul Jendral Amerika Serikat di Batavia kepada Menteri luar negeri pada 19 Desember 1946, Konferensi Denpasar dipandang sebagai langkah awal dalam membentuk *United States of Indonesia* dengan menekankan perlunya lembaga legislatif yang kuat agar dapat sejajar dengan Republik Indonesia maupun Belanda”(U.S. Consul General in Batavia, 1946 Desember 19. No.487).

Dengan demikian, keberadaan Sultan Hamid II dalam Konferensi Denpasar 1946 menunjukkan bahwa ia termasuk aktor politik federal yang berusaha memanfaatkan momentum perundingan dengan Belanda. Namun, keterlibatannya lebih mencerminkan peran partisipatif dalam jaringan politik federal dari pada sebagai pengambil keputusan utama, sehingga menjadi pijakan awal sebelum kiprahnya dalam dinamika politik nasional.

3. Keterlibatannya dalam Politik Nasional dan Lokal

Pembentukan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Sultan Hamid II sebelum ia tampil dalam forum federal maupun nasional. DIKB muncul sebagai hasil kesepakatan antara para raja dan elite lokal di Kalimantan Barat yang berupaya mempertahankan otonomi daerah setelah kekuasaan Jepang berakhir. Pada

masa pemerintahannya, Sultan Hamid II bukan hanya berperan sebagai Sultan Kesultanan Pontianak dan kepala Swaparaja, tetapi ia juga memimpin pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) Status hukum DIKB kemudian disahkan melalui keputusan Residen Kalimantan Barat dengan surat keputusan tertanggal 10 Mei 1948 No. 161. Selanjutnya, pada 2 Mei 1948 dikeluarkan Besluit Luitenant Gouverneur Jendral No. 8, yang tercatat dalam Lembaran Negara 1948/58, yang menetapkan Kalimantan Barat sebagai Daerah Istimewa (Agustina, 2023, p. 61).

Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB), merupakan hasil rekonstruksi pemerintahan lokal yang dilakukan Belanda pasca-1945 sebagai bagian dari strategi federalisme, yang dalam prosesnya melibatkan para penguasa tradisional. Dalam konteks ini, hubungan Belanda dengan elite lokal dapat dipandang sebagai bentuk negosiasi politik, di mana Sultan Hamid II menjadi tokoh sentral. Dalam kapasitasnya sebagai Sultan Kadriyah sekaligus pemimpin DIKB, Sultan Hamid memiliki legitimasi politik ganda: pertama, sebagai pemimpin tradisional yang dihormati. Kedua, sebagai pejabat administratif yang diakui secara legal. Posisi ini memperkuat perannya dalam forum Bijeerkomst voor Federal Sultan Hamid II juga memainkan perannya pada politik lokal di Kalimantan Barat. Hal ini tampak ketika ia ditunjuk sebagai kepala pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat DIKB (Agustina, 2010, pp.50). Kehadiran DIKB dapat dipandang sebagai “batu loncatan” bagi Sultan Hamid II dalam percaturan politik nasional. Dengan

kedudukan tersebut, ia tidak hanya berperan dalam lingkup lokal Kalimantan Barat, tetapi juga memiliki akses langsung pada wacana politik federal yang lebih luas. Hal ini memperlihatkan bahwa Sultan Hamid mampu memanfaatkan status istimewa daerahnya untuk memperluas pengaruh politik hingga ke level Republik Indonesia Serikat. Namun, status DIKB juga memperlihatkan dilema di satu sisi ia memperkuat otonomi daerah, tetapi di sisi lain menjadi bagian dari politik federal Belanda yang kemudian dianggap bertentangan dengan semangat persatuan Republik Indonesia.

Belanda berusaha membangun kembali pengaruhnya di Indonesia dengan mendorong sistem federal. Pada 1948, dibentuklah *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) sebagai wadah koordinasi antara negara-negara bagian di luar Republik Indonesia. Sultan Hamid II, penguasa Kesultanan Kadriyah Pontianak, dipercaya menjadi ketua BFO karena dianggap memiliki kemampuan diplomasi dan hubungan baik dengan Belanda (Reid, 1974, pp. 102). Sebagai ketua, Sultan Hamid II memimpin *Bijeenkomst voor Federaal Overlag* (BFO) dalam merumuskan sikap politik. Salah satu langkah penting adalah resolusi 3 maret 1949 yang menyuarakan diadakannya dialog dengan Republik Indonesia. Menurut Mohammad Roem resolusi ini menandai adanya keinginan kompromi di kalangan federalis meskipun federalis secara umum dipandang sebagai instrumen colonial. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Sultan Hamid II hadir sebagai ketua Delegasi BFO. Ia berperan penting dalam proses perundingan khususnya dalam memperjuangkan posisi

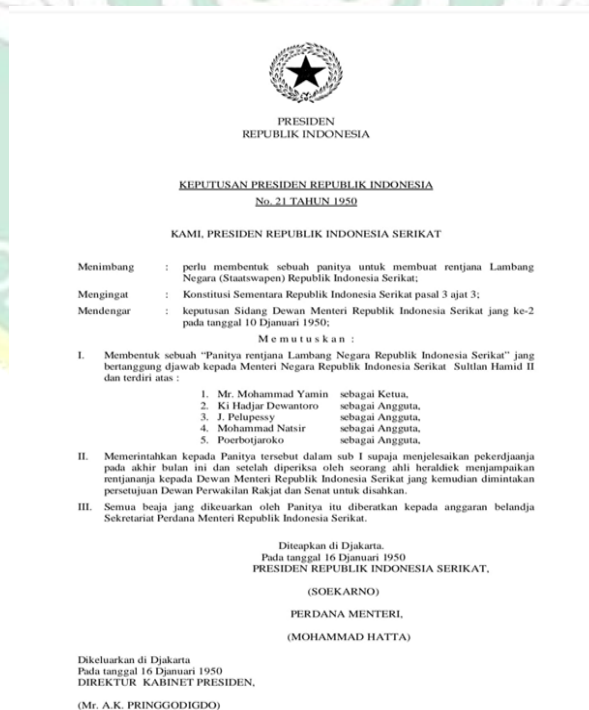
negara- negara bagian dalam struktur kenegaraan Indonesia yang baru. Hasil dari KMB tersebut adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Setelah itu Sultan Hamid II ditunjuk sebagai Menteri negara Zonder Portofolio dalam kabinet RIS. (Penders, 2002, pp. 123). Dengan hal itu Republik Indonesia Serikat bertahan tidak lama pada pertengahan 1950 sebagian besar negara bagian melebur ke dalam Republik Indonesia. Sehingga sistem federal berakhir. Menurut R.Z. Leirissa, kegagalan sistem federal ini disebabkan oleh lemahnya dukungan sosial-politik terhadap bentuk negara tersebut sehingga tokoh-tokoh federalis seperti Sultan Hamid II kehilangan pengaruhnya setelah integrasi ke dalam Republik Indonesia (Leirissa, 1991, p. 125).

Setelah berakhirnya sistem federal dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Peran Sultan Hamid II tidak serta- merta hilang dari panggung nasional. Ia masih tercatat sebagai tokoh penting yang memiliki kontribusi besar dalam bidang simbol kenegaraan. Salah satu karya monumentalnya adalah perancang Lambang Negara Garuda Pancasila yang hingga kini menjadi simbol identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Tugas tersebut di terimanya ketika menjabat sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (Heru Utomo, 2003, p. 31).

Keterlibatan Sultan Hamid II dalam masa pemerintah federal Republik Indonesia Serikat tidak hanya menunjukkan kiprahnya dalam politik nasional. Tetapi juga menandai pergeseran peran Kesultanan Kadriyah dari kekuasaan

tradisional menuju partisipasi aktif dalam pembentukan identitas kenegaraan. Salah satu kontribusi nyatanya dalam merancang lambang negara Indonesia. Yaitu Garuda Pancasila yang mencerminkan perpaduan nilai-nilai budaya dan nasionalisme pada masa pasca-kemerdekaan .

Keterlibatan Sultan Hamid II dalam perancangan lambang negara ini ditegaskan dalam dokumen pemerintah tahun 1950. Yang mana berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.21 Tahun 1950, Pembentukan panitia perancang Lambang Negara Sultan Hamid II selaku menteri Republik Indonesia Serikat menjadi penanggung jawab panitia yang mana Anggota panitia perancang Lambang negara itu diketuai oleh Mohammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, J. Pelupessy, Mohammad Natsir, Poebotjoko.



Gambar 3.7: Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.21 Tahun 1950 tentang pembentukan panitia Lambang Negara.
Sumber: (Sekretariat JDIH, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), 2025)

Namun pada rekaman wawancara Yayasan Idayu dengan Sultan Hamid II, terdapat keterangan berbeda Sultan Hamid II menyatakan bahwa dirinya ditugaskan langsung oleh Presiden Soekarno untuk menjadi bagian dari panitia perancang lambang negara bersama Mohammad Hatta, Mariah Ulfa, Strosatomo dan Mohammad Yamin. Dalam wawancara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa desain Garuda Pancasila yang dibuatnya berusaha memenuhi harapan Presiden Soekarno. Namun tetap menampilkan simbol yang berakar pada nilai budaya Nusantara.

“Saya sebagai menteri negara ditugaskan oleh Almarhum Presiden Soekarno untuk mengikuti 1 panitia menciptakan lambang negara. Anggota dari pada panitia itu Mohamad Yamin salah satu anggotanya, Mohamad Hatta, Mariah Ulfah dan satrosatomo. Pada waktu itu kepada para anggota memberi kepada saya sktsa-sktsa dari pada lambang negara yang menurut beliau bisa di pake untuk negara kita. Pada suatu ketika saya ingat ucapan bung Karno ialah Pancasila yang menurut beliau sendiri menggali bumi dari tanah kita sendiri mengingat ucapan Bung Karno itu saya mencoba membuat 1 lambang negara yang bisa memenuhi syarat Bung Karno” (Wawancara Yayasan Idayu dengan Sultan Hamid II, yang tersimpan dalam rekaman audio Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomer 21 Tahun 1950. Panitia Rancangan Lambang Negara di bentuk untuk merancang simbol kenegaraan Republik Indonesia Serikat. Dalam keputusan

tersebut disebutkan bahwa panitia berada di bawah tanggung jawab Sultan Hamid II, dengan susunan anggota sebagai berikut: Mohammad Yamin sebagai ketua, serta Ki Hajar Dewantara, J.Pelupessy, Mohammad Nasir, dan Poerbotjoko sebagai anggota (Keputusan Presiden RIS No.21 Tahun 1950). Dokumen ini merupakan sumber resmi negara yang menunjukkan struktur formal kepanitiaan dan tanggung jawab administratif di tingkat kementerian. Namun dalam wawancara yang di lakukan oleh yayasan Idayu yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sultan Hamid II menyebutkan nama-nama anggota yang berbeda yaitu Mohammad Hatta, Mariah Ulfah, Satrosatomo dan Mohammad Yamin (Wawancara Yayasan Idayu dengan Sultan Hamid II, Arsip Audio Perpusnas).

Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi antara catatan administratif pemerintah dan ingatan personal pelaku sejarah. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan komposisi panitia pada tahapan awal pembentukan, keterlibatan tokoh lain di luar struktur resmi, atau keterbatasan daya ingat mengingat wawancara dilakukan bertahun-tahun setelah peristiwa berlangsung. Selain itu, perbedaan informasi antara sumber resmi dan wawancara pribadi juga menunjukkan bahwa proses perancangan lambang negara tidak sepenuhnya bersifat formal dan kaku. Dalam praktiknya, Sultan Hamid II tampak melibatkan berbagai kalangan intelektual dan tokoh bangsa secara tidak langsung, baik untuk memperoleh masukan simbolik maupun legitimasi moral. Hal ini menggambarkan bahwa pembentukan

identitas nasional melalui lambang negara merupakan hasil interaksi antara struktur politik resmi dan jaringan informal para pemikir bangsa.

Dengan demikian, walaupun data administratif menetapkan komposisi panitia secara terbatas, wawancara Sultan Hamid II membuka bahwa terdapat peran lebih luas dari tokoh-tokoh lain yang tidak tercatat secara formal, namun turut memberi kontribusi intelektual terhadap rancangan Garuda Pancasila.



Gambar 3.8: Sketsa Rancangan Lambang Garuda Pancasila
(Sumber: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2025)

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.8 rancangan lambang Garuda Pancasila yang tercantum pada sampul surat disposisi Presiden Soekarno kepada Sultan Hamid II selaku Menteri Negara Republik Indonesia Serikat. Dokumen arsip tersebut menunjukkan bahwa proses perancangan lambang negara dilakukan secara langsung melalui komunikasi administratif antara Presiden Soekarno dan Sultan Hamid II. Rancangan tersebut menjadi bukti bahwa Sultan Hamid II memang menyusun rancangan lambang negara sesuai penugasan resmi yang diberikan kepadanya. Namun perbedaan rancangan dan

lambang negara yang telah diresmikan saat ini yang mana dapat dilihat pada bentuk kepala dan paruh garuda yang pada rancangan masih kecil, panjang dan bersifat naturalistis, sedangkan pada lambang negara resmi saat ini telah distilisasikan menjadi lebih tegas dan simbolik. Selain itu, posisi sayap pada rancangan masih melengkung dan belum distandarkan, sementara pada lambang negara saat ini sayapnya terbentang simetris dengan jumlah bulu yang telah dilakukan.

Perbedaan juga tampak pada bulu leher dan ekor Garuda, yang dalam rancangan digambarkan secara alami tanpa penetapan jumlah sedangkan pada lambang negara saat ini yang mana sudah distilisasi dan diberi makna simbolik. Dari segi perisai di dada pada rancangan menunjukkan bentuk dan simbol sila yang belum sepenuhnya proporsional dan seragam, sedangkan lambang negara saat ini telah dibakukan secara visual dan simbolik. Dengan demikian, rancangan tersebut merupakan draf desain yang belum memiliki status hukum, berbeda dengan lambang negara sekarang yang telah ditetapkan secara resmi (Heru Utomo dkk, 2023, pp. 39).

Dengan adanya, dokumen arsip tersebut semakin jelas bahwa proses perancangan lambang negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pertimbangan simbolik dan gagasan mengenai identitas nasional. Rancangan yang dibuat Sultan Hamid II menunjukkan bahwa sejak awal, ia telah mengupayakan representasi nilai-nilai persatuan dalam keberagaman melalui bentuk dan makna unsur-unsur yang disusunnya. Oleh karena itu,

pembahasan mengenai rancangan lambang negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran dan posisi politik Sultan Hamid II pada masa Republik Indonesia Serikat.

Meskipun Sultan Hamid II memiliki peran penting dalam merancang lambang negara yang menjadi simbol identitas nasional, karir politiknya tidak hanya terbatas pada aspek simbolik. Posisi strategisnya dalam struktur politik Rrpublik Indonesia Serikat (RIS), yang menempatkannya sebagai tokoh federalis berpengaruh, juga membuatnya menghadapi tekanan dan konflik dengan pemerintah pusat ketika arus *unitarisme* mulai menguat. Keterlibatan politiknya yang signifikan ini kemudian membawa konsekuensi hukum, sebagaimana tercatat dalam putusan Mahkamah Agung terhadap dirinya yang menandai ujian nyata terhadap posisi Sultan Hamid II dalam kacamata politik nasional. Menurut catatan buku *Proses Peristiwa Sultan Hamid II* juga memuat salinan lengkap putusan Mahkamah Agung terhadap Sjafride Hamid Algardrie atau Sultan Hamid II. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Sultan Hamid II dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh tahun karena terbukti dengan maksud untuk mempersiapkan kejahatan pemberontakan, mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan pemberontakan itu, dilakukan dalam keadaan perang (Persadja, 1955, p. 235).

Putusan ini memperlihatkan bagaimana pemerintah pusat berupaya menegakkan hukum terhadap tokoh-tokoh federalis yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas negara pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat

(RIS). Kasus ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari konsolidasi kekuasaan republik terhadap elite-elite daerah yang sebelumnya memiliki otonomi dan pengaruh besar dalam struktur politik federal. Secara sosial-politik, peristiwa ini menandai berakhirnya peran politik Kesultanan Kadriyah Pontianak. Setelah Sultan Hamid II dijatuhi hukuman, Kesultanan Kadriyah kehilangan fungsi administratifnya dan bergeser menjadi lembaga budaya serta simbol identitas lokal. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung tahun 1953 tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga menggambarkan transformasi sosial masyarakat Pontianak dari sistem tradisional berbasis kesultanan menuju tatanan pemerintahan republik yang terpusat. Oleh karena itu, dokumen Proses Peristiwa Sultan Hamid II menjadi sumber primer yang penting untuk memahami perubahan relasi kekuasaan antara pusat dan daerah di Kalimantan Barat pada awal masa kemerdekaan (Persadja, 1955)

Dengan kata lain kasus ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika rekonsiliasi antara bekas pejabat federal dan elite pro-republik. Jadi dari berbagai sumber diatas menunjukkan bahwa Sultan Hamid II mungkin terjebak dalam situasi politik yang kompleks sebagai tokoh federalis, ia sebelumnya dikenal aktif dalam perancangan lambang negara Garuda Pancasila dan memiliki hubungan dengan tokoh nasional seperti Presiden Soekarno. Namun perubahan arah politik pasca RIS menjadikan posisinya rentan dicurigai. Dalam kerangka ini, dakwaan keterlibatan dengan Westerling dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk mengeliminasi potensi oposisi federal di

tingkat nasional. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Sultan Hamid II pada 8 April 1953 menandai akhir kiprahnya di dunia politik Indonesia (Herianto, 2023, p. 47).

Dampak Kasus Westerling terhadap Posisi Politik Kesultanan Kadriyah kasus Westerling tidak hanya berdampak terhadap pribadi Sultan Hamid II, tetapi juga berimplikasi besar terhadap posisi politik Kesultanan Kadriyah di Pontianak. Setelah penangkapan dan vonis bersalah yang dijatuhkan melalui Forum Privilegium pada tahun 1953, legitimasi politik Sultan Hamid II sebagai pemimpin daerah melemah. Pemerintah pusat kemudian mengambil alih sebagian besar kewenangan administratif dan simbolik yang sebelumnya melekat pada Kesultanan Kadriyah. Kebijakan ini sejalan dengan langkah nasionalisasi lembaga-lembaga daerah bekas federal pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), yang bertujuan memperkuat kontrol pusat terhadap wilayah perbatasan, termasuk Kalimantan Barat.

Dalam kerangka nasional, Reid menjelaskan bahwa setelah masa revolusi, pemerintah Republik Indonesia berupaya menata ulang struktur kekuasaan daerah dengan mengurangi pengaruh para penguasa tradisional yang dianggap tidak sejalan dengan semangat negara kesatuan. Hal yang senada dikemukakan oleh Leirissa, bahwa pembubaran sistem federal menandai berakhirnya peran politik *aristokrasi* daerah dan munculnya tatanan *birokratis* baru yang berorientasi pada pemerintahan sipil. Berdasarkan konteks

ini, dinamika yang terjadi di Kesultanan Kadriyah dapat dipahami sebagai bagian dari proses nasional yang lebih luas, yaitu pergeseran kekuasaan dari otoritas tradisional ke arah sistem pemerintahan modern yang terpusat (Reid, 1974; Leirissa, 1991, pp. 120).

Sementara itu menurut Saminan, meskipun kekuasaan politik Kesultanan Kadriyah menurun, fungsi sosial-budayanya tetap bertahan. Istana Kadriyah tetap menjadi simbol kesinambungan sejarah dan identitas masyarakat Melayu Pontianak melalui pelestarian tradisi adat dan kegiatan keagamaan. Dengan demikian, meskipun kasus Westerling mengakhiri dominasi politik Kesultanan Kadriyah, peran kultural dan spiritualnya justru semakin menguat sebagai penjaga warisan sejarah dan budaya lokal (Saminan, 2015, p. 44). Seiring melemahnya posisi politiknya, proses hukum terhadap Sultan Hamid II semakin menambah tekanan terhadap keberlangsungan Kesultanan Kadriyah. Penurunan pengaruh politik tersebut diperburuk oleh proses hukum yang menjerat Sultan Hamid II. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara, dan peristiwa ini turut memengaruhi persepsi publik pada masa itu. Kronologi dan respons masyarakat terhadap kasus tersebut dapat dilihat dalam majalah Minggu Pagi, yang berhasil penulis temukan dan memuat laporan mengenai tanggapan publik pada periode tersebut.



Gambar 3.9: Pemberitaan tentang Sultan Hamid II, Majalah Minggu pagi 1953 (Dokumentasi pribadi, 2025).

Sebagaimana yang dijelaskan pada gambar 3.9 pemberitaan dalam Majalah Harian Minggu Pagi tahun 1953 yang berjudul “*Sultan Hamid II: Djalan Sepur Mati Ia Masuki, Sekali Salah Ril...*”, media menyoroti perjalanan politik Sultan Hamid II setelah keterlibatannya dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dan pembubaran Negara Indonesia Serikat. Tulisan tersebut tidak hanya mengulas pribadi Sultan Hamid II, tetapi juga menjadi cerminan perubahan posisi sosial dan politik Kesultanan Kadriyah Pontianak di masa transisi menuju pemerintahan Republik Indonesia.

Kutipan pertama menggambarkan persepsi media terhadap sosok Sultan Hamid II sebagai bangsawan berpendidikan yang gagal menempatkan dirinya secara tepat dalam arus politik nasional:

“Mulai batangnja memang nampak intelligent, tapi apabila sudah berjalan atas rel jang salah, maka ia tidak dapat kembali lagi” (Harian Pagi, 17 April 1953).

Secara simbolik, ungkapan tersebut bermakna bahwa Sultan Hamid II

dipandang sebagai tokoh yang memiliki kecerdasan dan kemampuan intelektual, namun salah langkah dalam mengambil posisi politiknya. Pilihannya untuk terlibat dalam politik federal dan hubungannya dengan Belanda dianggap sebagai “rel yang salah” oleh media yang berhaluan nasionalis. Pandangan ini menunjukkan bahwa pada masa itu, elite bangsawan seperti Sultan Hamid II menghadapi dilema besar: antara mempertahankan legitimasi tradisionalnya sebagai sultan, atau menyesuaikan diri dengan ideologi republik yang sedang tumbuh kuat.

Kritik media terhadap Sultan Hamid II sesungguhnya juga merupakan bentuk penilaian terhadap Kesultanan Kadriyah sebagai institusi politik tradisional yang mulai kehilangan relevansinya di tengah sistem pemerintahan baru. Kesultanan yang dahulu menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi di Kalimantan Barat berubah perannya menjadi lembaga simbolik dan budaya.

Kutipan kedua dalam artikel Majalah tersebut semakin memperjelas pandangan media terhadap perubahan nasib Kesultanan Kadriyah pasca keterlibatan Sultan Hamid II dalam konflik politik nasional:

“Dari Borneo jang dulu manis, sekarang pahit. Ia kini djadi tahanan. Tapi meski demikian, ia tetap berdarah biru.”(Harian Pagi, 1953).

Kalimat ini mencerminkan ironi sosial: bagaimana seorang bangsawan yang dahulu dihormati sebagai pemimpin Kalimantan Barat kini kehilangan kekuasaan politiknya, namun status kebangsawanannya tetap diakui secara simbolik. “ia tetap berdarah biru” mengandung makna bahwa struktur sosial tradisional yang menempatkan sultan dan keluarganya di posisi tinggi masih

diakui secara budaya, meskipun sudah tidak lagi memiliki pengaruh politik yang nyata.

Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan media pada masa itu bukan sekadar catatan peristiwa politik, tetapi juga menjadi refleksi terhadap transformasi sosial Kesultanan Kadriyah. Sultan Hamid II menjadi figur yang merepresentasikan transisi dari kekuasaan federal menuju tatanan sosial modern di bawah Republik Indonesia. Melalui narasi media, publik disuguhkan gambaran bahwa peran kesultanan sebagai penguasa politik telah berakhir, namun nilai-nilai budaya dan identitas Melayu yang melekat pada Kesultanan Kadriyah tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Pontianak.

Dengan demikian, majalah *Harian Pagi* tahun 1953 bukan hanya menjadi sumber informasi sejarah, tetapi juga bukti bagaimana media pada masa awal kemerdekaan berperan membentuk persepsi terhadap elite tradisional. Kritik terhadap Sultan Hamid II mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perubahan zaman dari kekuasaan monarki menuju pemerintahan republik yang juga menandai babak baru dalam sejarah sosial Kesultanan Kadriyah Pontianak.

4. Masa Pasif Kesultanan Kadriyah (1950-1978)

Periode tahun 1950 hingga 1978 menandai masa pasif Kesultanan Kadriyah Pontianak di bawah kepemimpinan Sultan Hamid II. Setelah dijatuhi hukuman oleh Forum Privilegiatum pada awal 1950-an, Sultan Hamid II tidak

lagi terlibat dalam politik nasional maupun lokal. Berakhirnya masa hukuman tersebut menandai transisi penting bagi Kesultanan Kadriyah, yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan diplomasi, menjadi lembaga budaya dan simbol identitas Melayu Pontianak. Perubahan politik pasca-kemerdekaan menyebabkan banyak kesultanan kehilangan legitimasi politik formal karena kebijakan sentralisasi pemerintahan. Namun demikian, Kadriyah tetap memainkan peran sosial, simbolik, dan keagamaan di tengah masyarakat (Aidulsyah & Ikhwan, 2023).

Dalam konteks ini, Kesultanan Kadriyah berperan sebagai wadah rekonsiliasi budaya. Hamzah mencatat bahwa masyarakat Melayu Pontianak masih menganggap istana sebagai “poros nilai”, tempat penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan tradisi, seperti Maulid Nabi, tahlilan, dan pengajian adat. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa istana tetap menjadi penjaga nilai-nilai Islam dan kebudayaan Melayu di tengah perubahan sosial modern. Peran ini menegaskan transformasi Kesultanan Kadriyah dari kekuasaan politik menjadi otoritas moral dan kultural yang berpengaruh di masyarakat (Hamzah, 2021, p. 28).

Selain itu, Ahdalami, menegaskan bahwa Sultan Hamid II tetap menjadi figur panutan yang menjaga kesinambungan nilai-nilai adat Melayu. Meskipun secara politik ia tersingkir, keberadaannya membantu mempertahankan legitimasi sosial Kesultanan Kadriyah (Ahdalami, Hidayat 2021, p 13). Hal ini diperkuat oleh Hidayat, yang menunjukkan bahwa

arsitektur Istana Kadriyah melalui tata ruang dan ornamen Melayu-Islam merepresentasikan kesinambungan warisan politik dan religius. Peran Kesultanan Kadriyah selama masa pasif ini mencerminkan proses invensi tradisi, yaitu mempertahankan simbol lama untuk memberi makna baru bagi identitas modern Pontianak. Hingga wafatnya Sultan Hamid II pada tahun 1978, Kesultanan Kadriyah tetap menjadi simbol persatuan dan kebanggaan masyarakat Melayu Kalimantan Barat.

Peran Kesultanan Kadriyah selama masa pasif ini mencerminkan bentuk legitimasi tradisional, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber. Menurut Weber, otoritas tradisional memperoleh kekuatan bukan dari struktur politik formal, melainkan dari warisan sejarah, adat, dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dianggap sah. Dalam konteks Kesultanan Kadriyah, penghormatan masyarakat terhadap Sultan Hamid II serta pelestarian simbol-simbol istana memperlihatkan bahwa legitimasi tradisional tetap bertahan di tengah melemahnya kekuasaan formal negara (Weber, 1978, p. 226).

Dengan demikian, masa pasif Sultan Hamid II (1950–1978) menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam fungsi Kesultanan Kadriyah dari lembaga politik menuju institusi budaya. Setelah kekuasaan administratifnya berakhir akibat integrasi Kalimantan Barat ke dalam NKRI, peran Sultan dan istana tidak sepenuhnya hilang, tetapi berubah menjadi pusat simbolik dan moral masyarakat Melayu Pontianak. Pergeseran ini menandakan

bahwa kekuasaan tradisional dapat beradaptasi dalam konteks negara modern melalui transformasi fungsi sosial dan budaya. Dalam perspektif Weber, keberlanjutan Kesultanan Kadriyah mencerminkan kuatnya legitimasi tradisional, yaitu bentuk otoritas yang tetap diakui karena bersumber dari sejarah, adat, dan nilai-nilai moral yang dipertahankan masyarakat. Oleh karena itu, masa pasif Sultan Hamid II bukan sekadar periode kemunduran, melainkan fase penting dalam proses resimbolisasi kekuasaan di era pascakolonial (Weber, 1978). Walaupun Sultan Hamid II tidak lagi memegang kekuasaan politik, peran Kesultanan Kadriyah tetap signifikan dalam mengatur kehidupan adat, keagamaan, dan simbol identitas masyarakat Melayu Pontianak. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat masih memberikan ruang bagi otoritas tradisional untuk mempertahankan pengaruhnya melalui legitimasi moral dan kultural.

B. Dinamika Sosial Kesultanan Kadriyah pada Masa Sultan Hamid II

1. Kondisi Sosial Masyarakat Pontianak Pasa- Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, masyarakat Pontianak mengalami perubahan sosial yang cukup besar. Pergeseran sistem sosial yang sebelumnya berpusat pada Kesultanan Kadriyah mulai berubah menuju tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Perubahan struktur sosial di Kalimantan Barat pada periode pasca kolonial dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu hilangnya peran politik Kesultanan dan meningkatnya pengaruh pemerintahan Republik Indonesia. Kondisi ini memaksa masyarakat Pontianak untuk menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang lebih moderen.

Di mana status sosial tidak lagi semata di tentukan oleh keturunan bangsawan, melainkan oleh pendidikan dan partisipasi dalam pemerintahan baru (Marihandono, 2018, p. 45-59).

Menurut Zaini, pada masa pasca- kemerdekaan masyarakat Pontianak mulai menunjukkan proses adaptasi sosial melalui kegiatan keagamaan dan solidaritas antar warga. Hal ini tampak dari aktifnya kegiatan pengajian. Peringatan hari besar Islam, serta tradisi sosial seperti gotong-royo dan sedekah kampung. Kesultanan Kadriyah meskipun sudah tidak berfungsi sebagai penguasa politik, tetap menjadi pusat moral dan spiritual masyarakat Melayu Pontianak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak sepenuhnya menghapus peran Kesultanan melainkan mentrans formasikannya menjadi lembaga sosial keagamaan yang memperkuat identitas kolektif masyarakat (Zaini, 2016, p. 2015). Dalam analisis Herlina, integrasi Pontianak ke dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia juga membuka ruang interaksi sosial yang lebih luas antara kelompok etnis Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Interaksi tersebut menumbuhkan dinamika sosial baru yang lebih inklusif, sekaigus mengurangi sekat-sekat sosial yang dulunya kuat dalam sistem federal. Masyarakat Pontianak mulai membangun jaringan sosial berdasarkan kepentingan bersama seperti pendidikan, ekonomi, dan keagamaan bukan lagi berdasarkan garis keturunan (Herlina, 2020, p. 24).

Perubahan sosial yang berlangsung pada masa Sultan Hamid II tersebut dapat dipahami melalui p,erspektif Max Weber tentang legitimasi kekuasaan

dan tindakan sosial. Menurut Weber, perubahan bentuk legitimasi dari tradisional menuju legal rasional akan di ikuti oleh tansformasi nilai dan pola hubungan sosial masyarakat (Weber, 1978). Dalam konteks Pontianak, meskipun Kesultanan kadriyah kehilangan legitimasi politik formalnya, kekuasaan simbolik Sultan Hamid II tetap bertahan melalui tindakan sosial berbasis nilai-nilai keagamaan dan adat Melayu. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak selalu bergantung pada struktur politik, tetapi juga dapat hidup dalam dimensi sosial dan kultural masyarakat. Hal ini juga menunjukkan adanya rasionalisasi sosial sebagaimana di jelaskan Weber di mana masyarakat mulai menata ulang hubungan sosial mereka berdasarkan kepentingan fungsional seperti pendidikan, ekonomi dan agama. Bukan semata mata karena garis keturunan bangsawan. Dengan kata lain, masyarakat Melayu Pontianak mengalami pergeseran dari struktur sosial tradisional menuju bentuk sosial yang rasional dan terbuka. Menurut Heryanto, perubahan ini menandai munculnya kelas sosial baru di Pontianak pasca 1950-an yang terdiri dari kaum birokrat, pedagang, dan toko agama yang turut mengantikan dominasi sosial elite istana (Heryanto, 2019, p. 16).

Perubahan sosial yang terjadi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah traumatik masyarakat Pontianak akibat tragedi Mandor tahun 1944, ketika banyak tokoh elite Melayu dan bangsawan istana menjadi korban kekerasan militer Jepang. Kehilangan figur pemimpin tradisional menyebabkan terganggunya tatanan sosial dan moral masyarakat Pontianak.

Peristiwa Mandor menimbulkan dampak sosial yang luas berupa hilangnya struktur kepemimpinan adat dan melemahnya kepercayaan sosial antar kelompok etnis di Kalimantan Barat. Kondisi ini menuntut adanya proses rekonstruksi sosial yang dilakukan melalui lembaga-lembaga keagamaan dan kultural yang masih memiliki legitimasi moral di Masyarakat (Moehammad, 202, p. 30).

Dalam konteks ini, Kesultanan Kadriyah memainkan peran penting sebagai simbol pemersatu masyarakat Melayu pasca tragedi Mandor. Meskipun tidak lagi berkuasa secara politik, Kesultanan menjadi pusat pemulihan sosial dan spiritual melalui kegiatan keagamaan, pendidikan Islam, serta pelestarian adat Melayu. Upaya Kesultanan dalam menghidupkan kembali tradisi keagamaan dan pendidikan menjadi bagian dari proses transformasi sosial pasca kolonial yang memperkuat kohesi sosial di Pontianak. Selain itu, Yani juga menegaskan bahwa peran simbolik Kesultanan membantu memulihkan kembali identitas kolektif masyarakat Melayu di tengah perubahan sosial modern yang mulai terbentuk pada dekade 1950–1970-an. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa proses rekonstruksi sosial pasca tragedi Mandor tidak hanya berupa pemulihan struktur sosial yang rusak, tetapi juga pembentukan ulang tatanan nilai dan solidaritas sosial baru yang berpijak pada legitimasi moral Kesultanan Kadriyah sebagai warisan budaya dan spiritual masyarakat Pontianak (Yani, 2019, p. 27).

Rekonsiliasi antar etnis juga menjadi fokus penting pada masa Sultan Hamid II. Setelah tragedi Mandor, hubungan antara Melayu, Dayak, dan Tionghoa sempat renggang akibat trauma dan kecurigaan yang ditinggalkan pendudukan Jepang. Sultan Hamid II berupaya membangun kembali keharmonisan sosial dengan menekankan kebersamaan lintas etnis. Ia menggunakan kedudukan Kesultanan Kadriyah sebagai simbol pemersatu, membuka ruang dialog melalui forum adat maupun pertemuan informal, serta mendorong kegiatan gotong-royong dalam pembangunan kampung, perbaikan rumah ibadah, dan penguatan organisasi pemuda. Langkah-langkah ini memberi ruang bagi semua etnis untuk bekerja sama tanpa menonjolkan perbedaan, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan solidaritas baru (Putra, 2016, p. 19). Dengan demikian, rekonsiliasi sosial di Kalimantan Barat pada masa itu bersifat simbolis sekaligus praktis melalui tindakan nyata yang melibatkan seluruh masyarakat.

2. Transformasi Sosial dan Peran Kesultanan Kadriyah

Setelah masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan, Kesultanan Kadriyah Pontianak mengalami proses transformasi sosial yang signifikan. Dalam konteks perubahan politik nasional dan hilangnya kekuasaan kolonial, istana Kadriyah beradaptasi dari lembaga feodal tradisional menjadi institusi sosial-kultural yang berperan menjaga kesinambungan nilai dan identitas masyarakat Pontianak. Peran kesultanan pada masa ini tidak lagi terbatas pada fungsi pemerintahan, tetapi berkembang menjadi wadah pelestarian budaya

Melayu dan pusat kegiatan keagamaan Islam yang berpengaruh bagi masyarakat setempat. Menurut Wibowo Kraton Kadriyah memiliki nilai historis dan edukatif yang kuat karena menjadi sumber pewarisan moral, budaya, dan karakter bangsa melalui kegiatan sosial dan budaya yang tetap dipertahankan hingga pasca-kemerdekaan (Wibowo, 2014, p. 40). Transformasi ini terjadi dalam situasi sosial yang kompleks. Pontianak merupakan kota multietnis yang dihuni oleh kelompok Melayu, Dayak, Tionghoa, dan pendatang dari berbagai wilayah Nusantara. Dalam struktur sosial seperti ini, keberadaan kesultanan berfungsi sebagai simbol pemersatu dan penyeimbang identitas antar-komunitas. Hermansyah mencatat bahwa kehidupan masyarakat Pontianak yang beragam sejak masa awal berdirinya telah membentuk pola hubungan sosial yang relatif inklusif, di mana nilai-nilai Islam dan adat Melayu menjadi fondasi moral bersama yang diakui oleh berbagai etnis. Dalam kerangka ini, Kesultanan Kadriyah dapat dipahami sebagai lembaga sosial yang memainkan peran integratif menjaga harmoni sosial sekaligus memperkuat kohesi antar-etnis melalui aktivitas keagamaan, pendidikan, dan upacara adat yang diselenggarakan di lingkungan istana.

Perubahan peran sosial dan budaya kesultanan tidak dapat dilepaskan dari sosok Sultan Hamid II, yang berupaya menempatkan Kesultanan Kadriyah dalam konteks modernitas dan politik nasional pasca-kolonial. Sultan Hamid II sebagai pemimpin pada masa pasca-kolonial menunjukkan kemampuan adaptif terhadap arus modernisasi dan nasionalisme yang berkembang di

Indonesia. Ia tidak hanya dikenal sebagai tokoh tradisional Melayu, tetapi juga sebagai sosok terdidik dengan pengalaman internasional. Sultan Hamid II menempuh pendidikan militer di Belanda dan berperan aktif dalam perdebatan politik awal Republik Indonesia, khususnya dalam pembentukan Negara Bagian Kalimantan Barat dan perumusan simbol kenegaraan Garuda Pancasila. Meskipun gagasan federalisme yang ia usung menimbulkan kontroversi, peran tersebut mencerminkan upayanya menegosiasikan posisi kesultanan di antara perubahan besar politik nasional. Dalam konteks sosial, hal ini menunjukkan bahwa Sultan Hamid II tidak sekadar mempertahankan legitimasi tradisional, tetapi juga berusaha menjembatani nilai-nilai lokal dengan ide modernitas dan nasionalisme baru (Teguh & Rina, 2023 p. 25).

Dari sudut pandang sosiologis, transformasi sosial yang dilakukan Kesultanan Kadriyah dapat dipahami sebagai bentuk resiliensi kultural kemampuan lembaga tradisional untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi identitasnya. Aktivitas sosial dan keagamaan yang dihidupkan kembali di istana, seperti peringatan keagamaan Islam dan kegiatan pendidikan berbasis nilai-nilai adat, menjadi sarana rekonstruksi moral masyarakat pasca-konflik kolonial. Fungsi sosial ini memperlihatkan bahwa istana bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga ruang rekonsiliasi dan pendidikan karakter. Magenda menjelaskan bahwa elite lokal di Kalimantan Barat, termasuk Kesultanan Kadriyah, memainkan peran ganda mempertahankan otoritas tradisional di tingkat lokal sekaligus beradaptasi

dengan struktur negara modern yang tengah dibangun (Magenda, 1991, p. 123). Dengan demikian, peran Kesultanan Kadriyah pada masa transisi pasca-kemerdekaan mencerminkan model adaptasi sosial yang khas: dari institusi kerajaan menuju lembaga sosial-budaya yang partisipatif. Melalui kegiatan budaya, pendidikan Islam, dan penguatan nilai adat, kesultanan berhasil mempertahankan relevansinya di tengah arus nasionalisme dan modernisasi. Transformasi ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan istana untuk bertahan, tetapi juga menjadi bukti bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Pontianak yang plural dan dinamis.

3. Pelestarian Identitas Budaya dan Peran Kesultanan Kadriyah sebagai Pusat Nilai Sosial-Religius

Pada masa pasca-kemerdekaan hingga era kepemimpinan Sultan Hamid II, Kesultanan Kadriyah tidak lagi berperan sebagai lembaga politik yang memiliki kekuasaan administratif formal. Namun, fungsi sosial dan kulturalnya tetap berjalan sebagai pusat pelestarian nilai-nilai tradisional masyarakat Pontianak. Istana Kadriyah menjadi simbol keberlanjutan identitas Melayu-Islam dan menjadi wadah bagi kegiatan keagamaan, adat, serta pendidikan non-formal. Transformasi peran ini menunjukkan adanya pergeseran dari otoritas politik menuju fungsi sosial-kultural yang lebih kuat (Arifuddin & Muzammil, 2020, p. 33).

Sebagai lembaga tradisional, Kesultanan Kadriyah memainkan peran

penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai sosial yang berbasis pada ajaran Islam. Melalui kegiatan dakwah, peringatan hari besar keagamaan, serta pendidikan agama di lingkungan istana, kesultanan tetap mempertahankan fungsi moral dan spiritualnya di tengah perubahan sosial yang pesat. Arifuddin dan Muzammil menjelaskan bahwa strategi komunikasi dakwah yang dilakukan pihak kesultanan bersifat struktural yakni melibatkan tokoh agama, guru ngaji, dan masyarakat sekitar istana sebagai agen penyebar nilai keislaman. Pola ini memperlihatkan bahwa walaupun posisi politiknya melemah, peran sosial-religius kesultanan justru semakin menonjol (Arifuddin & Muzammil, 2020, p. 35).

Selain fungsi keagamaan, Kesultanan Kadriyah juga memiliki kontribusi dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah Pontianak. Istana Kadriyah tidak hanya menjadi pusat kegiatan adat, tetapi juga berperan sebagai situs sejarah yang memiliki nilai edukatif. Masyarakat Pontianak Timur masih memandang keberadaan istana sebagai simbol kebanggaan lokal serta bukti konkret sejarah terbentuknya kota Pontianak. Persepsi ini mencerminkan adanya ikatan emosional dan historis antara masyarakat dan kesultanan, di mana keberadaan istana tidak hanya dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai representasi nilai budaya Melayu yang terus hidup dalam masyarakat (Monika, Noor, & Chalimi, 2020, p. 3).

Dalam bidang pendidikan, peran Kesultanan Kadriyah sesungguhnya telah mengakar sejak abad ke-18 dan berlanjut hingga masa Sultan Hamid II.

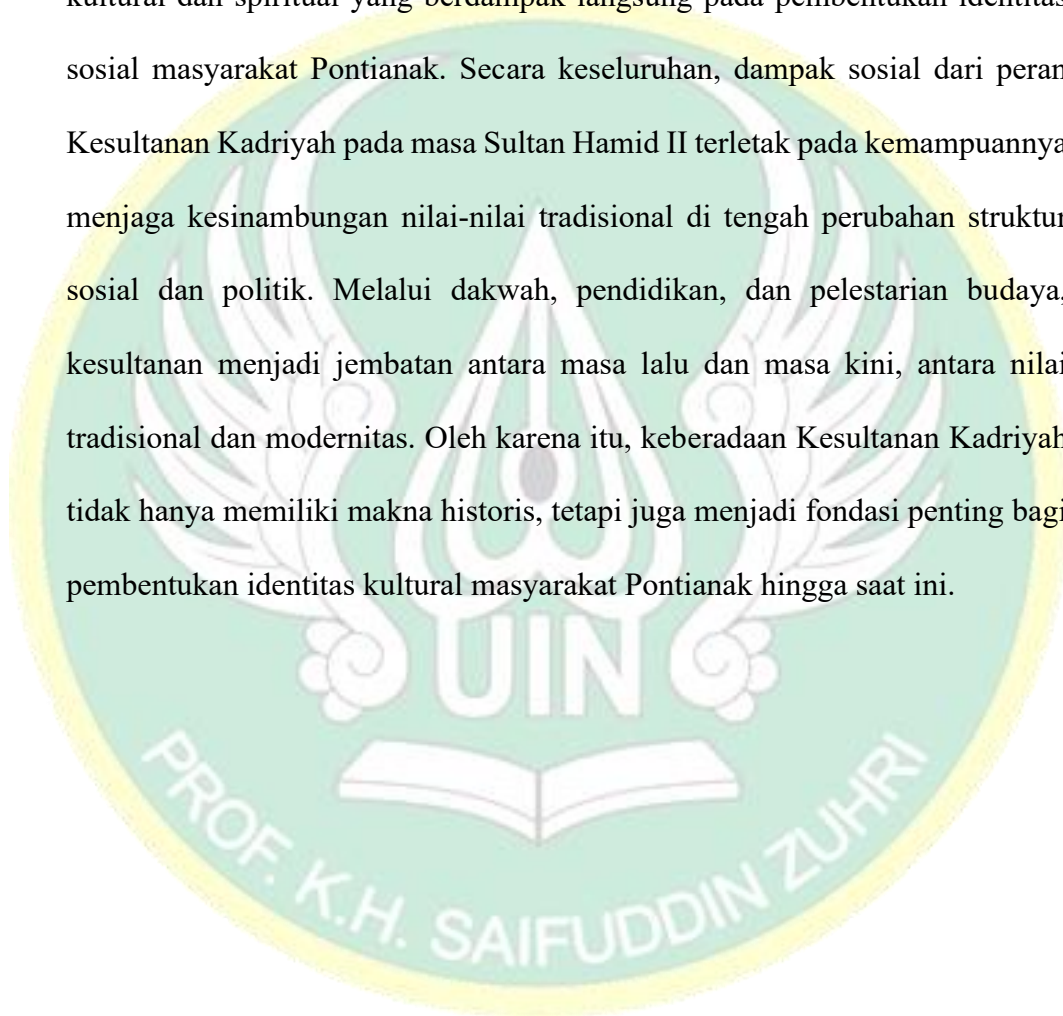
Menurut Suprianto, sistem pendidikan Islam di lingkungan kesultanan menekankan pentingnya penguasaan ilmu agama, bahasa Arab, dan etika sosial. Tradisi pendidikan ini kemudian diteruskan dalam bentuk madrasah dan pengajian di sekitar istana, yang menjadi sarana pembentukan karakter masyarakat Pontianak. Kegiatan semacam ini berfungsi menjaga moralitas dan memperkuat kohesi sosial di tengah arus modernisasi yang datang pasca-kemerdekaan (Suprianto, 2021, p. 20).

Lebih jauh, dalam konteks perkembangan dakwah di Pontianak, Estuningtiyas, menegaskan bahwa Kesultanan Kadriyah memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Dakwah yang dilakukan oleh keluarga kesultanan berorientasi pada pembinaan masyarakat melalui pendekatan kultural dan keteladanan. Pendekatan ini menjadikan kesultanan tidak hanya sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial antara berbagai etnis dan agama di Pontianak. Hal ini penting karena masa pasca-kemerdekaan ditandai oleh meningkatnya mobilitas sosial dan pluralitas masyarakat yang membutuhkan stabilitas moral dan identitas kolektif (Estuningtiyas, 2021, p. 32).

Pelestarian identitas budaya oleh Kesultanan Kadriyah juga dapat dilihat dari upaya menjaga upacara adat, naskah-naskah klasik, serta benda-benda cagar budaya yang menjadi warisan leluhur.

Monika mencatat bahwa meskipun banyak tantangan modernisasi dan urbanisasi, masyarakat sekitar istana tetap terlibat aktif dalam kegiatan

pelestarian tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat ini menjadi bukti bahwa kesultanan masih memiliki legitimasi sosial yang kuat meski tidak lagi berkuasa secara formal (Monika, 2020, p. 29). Dengan demikian, peran Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II lebih menekankan aspek kultural dan spiritual yang berdampak langsung pada pembentukan identitas sosial masyarakat Pontianak. Secara keseluruhan, dampak sosial dari peran Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II terletak pada kemampuannya menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan struktur sosial dan politik. Melalui dakwah, pendidikan, dan pelestarian budaya, kesultanan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara nilai tradisional dan modernitas. Oleh karena itu, keberadaan Kesultanan Kadriyah tidak hanya memiliki makna historis, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembentukan identitas kultural masyarakat Pontianak hingga saat ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkembangan Kesultanan Kadriyah pada masa Sultan Hamid II di Pontianak tahun 1945-1978. Dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sultan Hamid II bernama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Qadrie, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913. Ia merupakan putra dari Syarif Muhammad Al-Qadrie dan Syecha Jamilah Syarwani. Latar belakang kelahiran dalam keluarga bangsawan kesultanan memberikan legitimasi genealogis sekaligus membentuk identitas Sultan Hamid II sebagai penerus kekuasaan tradisional Kesultanan Kadriyah. Sejak masa kecil, ia tumbuh dalam lingkungan istana yang sarat dengan nilai adat, tradisi pemerintahan, serta peran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Barat, yang membentuk dasar pengetahuan awalnya mengenai sistem kekuasaan tradisional dan hubungan antara agama dan pemerintahan. Sebelum masa pemerintahannya, Kesultanan Kadriyah telah berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan keagamaan sejak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie pada abad ke-18. Namun, memasuki masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, peran politik kesultanan mengalami kemunduran akibat intervensi kekuasaan asing yang membatasi kewenangan sultan dalam pemerintahan, yang kemudian memengaruhi cara pandang Sultan Hamid II dalam memahami perubahan struktur kekuasaan dan perlunya

penyesuaian antara sistem pemerintahan tradisional dan modern.

2. Pada pemerintahan Sultan Hamid II (1945-1978). Kesultanan Kadriyah menghadapi dinamika politik dan sosial yang kompleks. Sultan Hamid II memperoleh pendidikan modern di sekolah-sekolah Belanda seperti Europeesche Lagere School (ELS) dan Hoogere Burgerschool (HBS), serta melanjutkan ke Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Breda, Belanda. Pengalaman pendidikan tersebut membentuk pola pikir Sultan Hamid II yang moderen, rasional, dan berorientasi pada kemajuan sehingga ia menjadi sosok bangsawan yang memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. berperan dalam dinamika politik nasional, termasuk keterlibatannya dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan sebagai perancang lambang Negara Garuda Pancasila. Namun, keterkaitannya dengan peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), berdampak pada menurunnya posisi politik Sultan Hamid II dan hilangnya pengaruh administratif Kesultanan Kadriyah. Meskipun demikian, secara sosial dan kultural, Kesultanan Kadriyah tetap berfungsi sebagai pusat pelestarian nilai-nilai Islam dan adat Melayu melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, serta kebudayaan, sehingga menunjukkan adanya pergeseran fungsi kesultanan dari lembaga politik tradisional menjadi lembaga sosial-budaya yang menjaga identitas Melayu-Islam masyarakat Pontianak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak.

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai peran Sultan Hamid II dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Kadriyah pada masa transisi politik dari negara federal menuju negara kesatuan. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis strategi adaptasi yang dilakukan Sultan Hamid II dalam bidang politik, sosial, dan budaya sehingga kontribusinya terhadap sejarah lokal dan nasional dapat dipahami secara komprehensif.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Kebudayaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam upaya pelestarian dan penguatan narasi sejarah Kesultanan Kadriyah khususnya yang berkaitan dengan peran Sultan Hamid II. Pemerintahan daerah dan lembaga kebudayaan dapat mengintegrasikan hasil penelitian ini ke dalam program edukasi sejarah lokal, pengelolaan museum, serta kegiatan kebudayaan berbasis narasi sejarah sebagai penguatan identitas sejarah lokal.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami sejarah Kesultanan Kadriyah secara lebih kritis dan berimbang, khususnya dalam melihat Sultan Hamid II sebagai tokoh sejarah yang berperan dalam dinamika politik nasional sekaligus dalam menjaga keberlanjutan nilai sosial dan budaya lokal. Pemahaman tersebut penting untuk menumbuhkan kesadaran historis dan apresiasi terhadap warisan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak.
- Agustina, T. (2010). *Eksistensi Tokoh Sultan Hamid II Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (1943-1955)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ahmadin, A. (2023). *Pengaruh Kontak VOC terhadap Perubahan Sosial dan Politik Kesultanan Kadriyah Pontianak*. Universitas Tanjungpura.
- Anthony Reid. (1974). *The Indonesia Nasional Revolution 1945-1950*. Longman.
- Andang & Edwin. (2023). The Role Dutch East Indies Government In Building Pontianak City Center: Peran Pemerintahan Hindia Belanda Dalam Membangaun Pusat Kota Pontianak. *Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora*. 7 (2).
- Astrini Eka Putri. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam Masa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie dan Pemerintahan Kolonial Belanda. *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4345–4353.
- Arsip Nasional Reuplik Indonesia. (1946). Notulen Konferensi Malino. Jakarta: ANRI, Koleksi Arsip Konfesensi Malino, No.27
- Dimiyati, A., Iskandar, N., & Nur, T. F. (2013). *Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara “Elang Rajawali-Garuda Pancasila.”* Top Indonesia : Pontianak.
- Djabier, B. (1991). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*. Pustaka Pelajar.
- Djamhari. (2010). *Sejarah Sosial dan Politik Kalimantan Barat pada Masa Kolonial*. Universitas Tanjungpura Press.
- Estuningtiyas, R.D., 2021. Peta Dakwah Islam di Pontianak. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 6(2).
- Fachi Aidulsyah & Hikmatul Ikhwan. (2023). The Rise and Fall of Sultanate Authorities in Post- Colonial Indonesia. *SUVANNABHUMI*, 15(1), 61–89.
- Firmansyah. (2021). Dinamika Kolonialisme dan Perubahan Ruang Kota Pontianak pada Abad ke-18 hingga Awal Abad ke-20. *Sejarah Dan Budaya*, 15(2), 101–115.

- Firmanto, A. (2012). Jejak Sejarah Kesultanan Pontianak (Kajian situs makam Batu Layang. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 10(2), 249–278.
- Hasanuddin. (2016). Politik dan Perdagangan Kolonial Belanda Di Pontianak. *Patanjala*, 8(2), 203–218.
- Hasanudin & Budi Kristanto. (2001). Proses Terbentuknya Heterogenitas Etnis di Pontianak pada Abad ke-19. *Humaniora*, 13(1), 64–81.
- Heryanto. (2019). Transformasi Sosial Elit Melayu di Kalimantan Barat Pasca Kemerdekaan. *Ilmu Sosial Indonesia*, 8(1).
- Heru Utomo. (2003). Garuda Pancasila Sejarah dan Penciptaan Lambang Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Idiologi Pancasila.
- Herianto, H. (2023). Analisis pragmatik tuturan requisitoir dan pleidoi dalam buku Proses Peristiwa Sultan Hamid II. *J-innovative*, 2(1), 45–60.
- Herlina. (2020). *Interaksi Sosial Antar Etnis di Pontianak Pasca- Kemerdekaan*. Pontianak. Tanjung Press.
- Iskandar. (2001). *Sultan Hamid II: Pemimpin dan Pencipta Lambang Negara Indonesia*. Nasional.
- Kanwil. (1992). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Barat*. Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Leirissa. (1991). *Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Pustaka Sinar Harapan.
- M.C. Ricklefs. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd Editio). Palgrave.
- Mary Somers Heidhues. (1998). The First Two Sultans of Pontianak. *Indonesia*, 91–112.
- Marihandono, T. (2018). *Transformasi Struktur Sosial di Kalimantan Barat Pasca-kemerdekaan*. *Jurnal Sosiologi dan Budaya*, 12 (2). 45-59
- Minggu Pagi. (1953, 22 Februari). Minggu Pagi, No.47. Yogyakarta.
- Muhammad Hidayat. (2020). Mix Metheds for Ethnic Accultural Study on History of Architectural Elements: Vernacular Houses during Pontianak Sultane.

Ilmiah Arsitektur Dan Lingkungan Binaan, 18(1), 94–108.

- Moehammad, A. (2021). *Rekontruksi Antar Etnis di Pontianak Pasca Tragedi Mandor*. Jakarta Cendikia.
- Monika, V.D., Noor, A.S. & Chalimi, I.R., (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Benda Cagar Budaya Istana Kesultanan Kadriyah Pontianak Timur
- Nasrudin. (2019). *Kesultanan Kadriyah: Sejarah dan Perkembangan* (pertama). CV Lakeishia.
- Putra. M. (2016). *Rekontruksi Antar Etnis di Pontianak*. Tanjungpura Press.
- Pramono. (2016). Sultan Hamid II dan Kesultanan Kadriyah: Peran dan Tantangan dalam Politik. *Sejarah Dan Budaya*, 12(2).
- Prsadja. (1955). Peristiwa Sultan Hamid II. Djakarta: Fasco
- Rijal, M., Bosra, M., & Ridha, M. R. (2018). Malino: Kota perdamaian dan kawasan wisata di Kabupaten Gowa (1946–2002). Repository Universitas Negeri Makassar. Diakses dari <https://www.academia.edu>
- Rikaz Prabowo. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal di Masa Pendudukan Jepang. *Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(1).
- Samingan. (2020). Sultan Hamid II: Di Balik Layar Lambang Garuda Tenggelam Dalam Sejarah. *Sajarotun Pendidikan Sejarah Universitas Flores*, 04 No 1.
- Sirrullah Bin Syaiful. (2019). *Sejarah Kesultanan Kadriah Pontianak 1771-2017*. UIN Sunan Ampel.
- Sjamsoeddin, H. (1985). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Kalimantan Barat*. Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Sulaiman. (2008). *Politik Peran Kesultanan dalam Indonesia Moderen: Kasus Kesultanan Kadriah Pontianak*. Universitas Tanjungpura.
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Pustaka Setia.
- Sutherland, H. (1979). *The Mangking of a Burreaucratic Elite: The Colonial Transformation of Javanese Priyayi*. Heinemann.
- Suryadinata, Leo. 2010. *Indonesia's Political Parties and the 2009 Elections*. Singapore: ISEAS.

- Syarif Ibrahim Alqadrie. (1984). *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Jakarta.
- Syafarudin Usman. (2000). *Sejarah Pemerintahan Kesultanan dan Kota Pontianak*. Romeo Grafika
- Teguh Agustina, R. (2023). Menggali Nilai-Nilai Kepahlawanan Sultan Hamid. *Sejarah, Budaya Dan Sosial*, 3(2).
- Turnan. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- United States Department of State. (1946). *Foreign Relations of the United States, 1946, Volume VII: The Far East (The Netherland East Indies)*. Washington, D.C.: Government Printing Office.
- Vickers Adrian. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Wibowo, A. (2014). *Transformasi Sosial Kesultanan Kadriyah Pontianak*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Yayasan Idayu, Wawancara antara Masagung dengan Sultan Hamid II, 1974, Rekaman Suara. Koleksi Perpustakaan Republik Indonesia.
- Yusriadi. (2006). *Kesultanan Pontianak dalam Lintas Sejarah*. STAIN Pontianak Press.
- Zaini, M. (2016). Kesultanan Melayu Sebagai Pusat Identitas Sosial dan Keagamaan di Kalimantan Barat. *Sejarah Dan Budaya*, 10(2)



Lampiran 1: Gambar-Gambar

Majalah minggu pagi, No.47, 1953

SULTAN HAMID II

DJALAN SEPUR MATI IA MASUKI SEKALI SALAH RIL

SULTAN HAMID ialah di-
nyanyikan dan terlatak di-
satu dalam "Minggu
Pagi" ig. 22 April 1951. Dituduh
bahwa Hamid tiga tahun lalu,
kemula ia bernyanyi diang-
kat, dan dalam hal ini perla-
ma M.H. ketika Sultan Ha-
mid mengahui Ratu IX. dan
menjadi pertabahan.

Terdapat juga, amat menara
perhatian ketika itu pertaba-
han besar yang tamak antara
dua sultan itu, Sultan Hamid
Alghadi II dan Sultan Ha-
mid Sultan IX. Kedua-
duanya, amat sangat terpeda-
jar, amat sangat berbeza.
..... Inaghi Sultan Hamid-
ku Sultan IX. dan Sultan
Hamid diarahkan mati.

Sultan Hamid dipikak ana,
hala lila. Tetapi Sultan Hamid
mendaki luhannya ia dipikak
ana, bukan. Dengan meng-
gunakan kebajikan bangsa.
Hanya juga benar dan la-
nah air. Tapi kebajikan ia
dijana yang dipikak ana
lah juga, polter baik untuk
menjaga kebajikan bang-
sanya!

Lantas pembaja berhal
boleh benar? — Memang se-
menghal, amat boleh di-
sifatkan. Tol Amat benar, A-
mat benar. Tapi orang di-
sifatkan ia hanya dapat memajukan
ahla perkataan anda untuk
menunjukkan kebajikan itu:
tolot!

Masukan Sultan Hamid to-



....., telah menjadi penerangan
dan kemuliaan politik mela-
teri yang amat luhur dan stabi-
lisasi itu memang Sultan Ha-
mid Sultan IX orang yang
teladigant.

....., telah menjadi penerangan
dan kemuliaan politik mela-
teri yang amat luhur dan stabi-
lisasi itu memang Sultan Ha-
mid Sultan IX orang yang
teladigant.

....., telah menjadi penerangan
dan kemuliaan politik mela-
teri yang amat luhur dan stabi-
lisasi itu memang Sultan Ha-
mid Sultan IX orang yang
teladigant.

....., telah menjadi penerangan
dan kemuliaan politik mela-
teri yang amat luhur dan stabi-
lisasi itu memang Sultan Ha-
mid Sultan IX orang yang
teladigant.



Dokumen aktkelahiran Sultan Hamid II , Pepustakaan Nasional RI, 1919

VERKLARING VAN INGEZETENSCHAP.

Residentie Wester afdeeling van Borneo. No. 146.

Onderafdeeling PONTIANAK No.

Het Hoofd van plaatselijke Residentie van PONTIANAK verklaart dat het hem bekend is dat
Siang Hamid bin Abdussamad Alhambra Sultan Hamid bin Sultan
 geboren en in zijne afdeeling woonachtig is geweest te
 PONTIANAK op 15 Maart 1919

Het Hoofd van Plaatselijk Residentie
 (n.v.v.) e. de Wit.

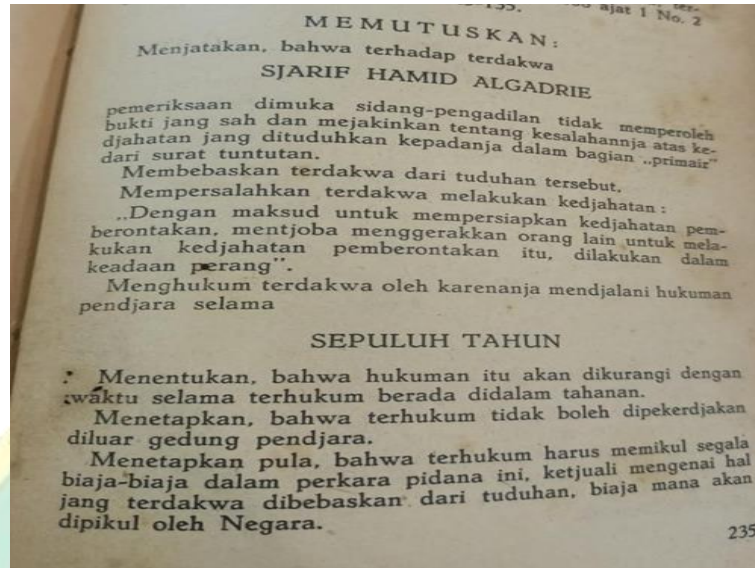
Ouderdom: 5 jaren
 Vader: *Siang Alhambra Alhambra*
 Moeder: *Hyemurati b. Pontianak*

Merkbaar tekens: *Handteekening van den Hoofd*

Langte: 1.26 M

Houtverduidelijking van den Hoofd.

Fasco, Proses Sultan Hamid II, 1955 (koleksi buku langka Perpustakaan Nasional RI)



Garuda Pancasila sampul depan surat disposisi, Perpustakaan Nasional RI, diakses 2024



Lampiran 2: Surat Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinszu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B.25/Un.19/FUAH/PP.05.3/2/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Resa Nurul Anisa
NIM : 214110503025
Semester : 7
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

Perkembangan Kesultanan Kadriyah Pada Masa Sultan Hamid II Pontianak (1945-1978 M)

Pada Hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Konsistensi penulisan nama kadriyah atau kadariyah. Nama agama tokoh kerajaan ditulis huruf kapital awalnya. Tinjauan pustaka diperkaya dengan tambah 2 karya lagi. Teori:Teori konflik politik dan elite atau legitimasi kekuasaan(Weber). Metode:sumber primernya apa? Sumber sekunder apa?. Sistematika penulisan bab II dan III harus dipertegas.
2. Referensi yang perlu dirujuk :1.Buku-buku tentang biografi Sultan Hamid II. 2.Buku-buku sejarah Indonesia masa revolusi 1945-1950. Istilah selain bahasa Indonesia ditulis miring. Referensi perlu diperkaya. Alasan pemilihan topik :emosional/intelektual?
- 3.
- 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Pembimbing,

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Februari 2025
Penguji,

Nurrohim, Lc.M.Hum

Jamaluddin, M.A

Lampiran 3: Surat Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B-136/Un.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/9/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Resa Nurul Anisa
NIM : 214110503025
Fak/Prodi : FUAH/ Sejarah Peradaban Islam
Semester : 9
Tahun Masuk : 2021

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Sejarah Peradaban Islam pada Tanggal 19 September 2025: **Lulus dengan Nilai: 77 (B+)**


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 19 September 2025



Wakil Dekan I Bidang Akademik


Prof. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
NIP. 197402281999031005

Lampiran 4: Surat Bimbingan skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Resa Nurul Anisa
NIM : 214110503025
Jurusan/Prodi : SPI (Sejarah Peradaban Islam)
Pembimbing : Nurrohm, Lc, M.Hum

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Senin 2 Desember 2024	Revisi Proposal skripsi bab I		
2.	Rabu 11 Desember 2024	Revisi Landasan Teori		
3.	Senin 16 Desember 2024	perbaikan Kepenulitan		
4	Rabu 18 Desember 2024	Acc proposal skripsi untuk di terima		
5.	Kamis 16 Oktober 2025	Bimbingan Bab I . 2,3 skripsi		
6.	Jelasa 28 Oktober 2025	Revisi Bab I . 2,3 skripsi		
7.	Jelasa 9 November 2025	Revisi Abstrak . Kepenulitan . bab . 2, 3		
8.	Jelasa 18 November 2025	ACC skripsi untuk dimunaqasyahkan		

*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunaqasyahkan

Dibuat di : Purwokerto
Tanggal :
Dosen Pembimbing

Nurrohm, Lc., M.Hum
NIP. 198709022019031011

Lampiran 5: Surat Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Resa Nurul Anisa
NIM : 214110503025
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam
Angkatan Tahun : 2021
Judul Proposal Skripsi : Perkembangan Kesultanan Kadriyah Pada Masa Sultan Hamid II
Di Pontianak (1945-1978)


Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

Mengetahui,
Koordinator Program Studi SPI


Nurrohmah L., M.Hum
NIP.198709022019031011

Dosen Pembimbing


Nurrohmah L., M.Hum
NIP.198709022019031011

Lampiran 6: Surat Sumbang buku



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN
NPP: 3302272F1000001**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-5878/Un.19/K.Pus/PP.08.1/11/2025

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : RESA NURUL ANISA
NIM : 214110503025
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH) / Sejarah Peradaban Islam

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 20 November 2025



Kepala,

Indah Wijaya Antasari

Lampiran 7: Surat Cek Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : **B-201/Un.19/Kalab.FUAH/PP.08.2/11/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sidik Fauji, M. Hum.
NIP : 199201242018011002
Jabatan : Kepala Laboratorium FUAH

Menerangkan bahwa, mahasiswa kami :

Nama : RESA NURUL ANISA
NIM : 214110503025
Prodi : SPI
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN KESULTANAN KADRIYAH PADA
MASA SULTAN HAMID II DI PONTIANAK (1945-
1978 M)

Dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut melakukan cek plagiasi terhadap skripsi pada tanggal **20 November 2025** melalui **turnitin** dengan hasil kesamaan keseluruhan ialah **15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 November 2025

Kalab FUAH,




Sidik Fauji, M. Hum.
NIP. 199201242018011002

Lampiran 8: Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp.0281-635624, 628250 | www.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: Un.17/UPT.MAJ/8095/07/2024

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jam'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada:

RESA NURUL ANISA

(NIM: 214110503025)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tulis : 70
Tartil : 85

Imla' : 80
Praktek : 70

Tahfidz : 85



ValidationCode

Lampran 10: Sertifikat Bahasa Inggris



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsalzu.ac.id | www.bahasa.uinsalzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بپوروكرتو
الوحده لتنمية اللغة
www.uinsalzu.ac.id | www.bahasa.uinsalzu.ac.id



الشهادة
NoB-3255/U.n.19/K.Bhs/PP009/12022

This is to certify that

Name : RESA NURUL ANISA
Place and Date of Birth : Brebes, 10 Oktober 2002
Has taken with Computer Based Test, organized by Language Based Development Unit on: 11 December 2021

Listening Comprehension: 51 Structure and Written Expression: 42
فهم السموع فهم العبارات والتركيب

Obtained Score : 450
الاجممع الكلي

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بپوروكرتو.




EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQIA
Kebudayaan al-Qadim'ah at Lughah al-Arabiyah

Purwokerto, 10 Januari 2022
The Head of Language Development Unit,
Mujibah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 2000032 001



Lampiran 11: Sertifikat PPL



Lampiran 12 : Sertifikat KKN



The certificate features a decorative header with a green and yellow leaf-like graphic on the left. In the top right corner, there are three logos: the UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto logo, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat', and the KAMPUS logo. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large green font. Below it, the certificate number is provided. The issuing institution is identified as the LPPM of the university. The student's name and NIM are listed. The text states that the student has successfully completed the KKN activity and is declared 'LULUS' with a grade of 88 (A). A portrait photo of the student and a QR code are included at the bottom.

 |  **LPPM**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1055/B-1356/Un.19/K.LPPM/HM.02/9/2025

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **RESA NURUL ANISA**
NIM : **214110503025**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-56 Tahun 2025,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **88 (A)**.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

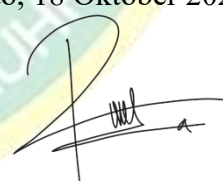
A. Identitas Diri

Nama : Resa Nurul Anisa
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 10 Oktober 2002
Nama Ayah : Redy Bhakti
Nama Ibu : Samrotul Fuadah
Alamat Rumah : Jln. Kopo Gg.Parasdi Dalam IV, RT 02, RW 07
Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojong loa
kidul, Kota Bandung.

B. Riwayat Pendidikan Formal dan Non-Formal

- a. SD Islam Losari Lor Berbes
- b. SDN Kopo 5 Bandung
- c. SMP Islam Andalusia Kebasen
- d. SMA Islam Analusia Kebasen
- e. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021)
- f. Pondok Pesantren At-taujeh Al- Islami 2 Andalusia
- g. Pondok Pesantren Qur'an Al- amin Pabuaran

Purwokerto, 18 Oktober 2025



Resa Nurul Anisa